



PROSIDING

**LOKAKARYA ANTI PERBURUAN DAN
PERDAGANGAN ILLEGAL HARIMAU SUMATERA
DAN PRODUK-PRODUKNYA
SERTA
DEKLARASI JARINGAN ADVOKASI HARIMAU, BADAK
DAN GAJAH**



**Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
dan**

**The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust
Sumatran Tiger Conservation Program**

Bogor, November 2002

**Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust
Sumatran Tiger Conservation Program**

**Lokakarya Anti Perburuan Dan
Perdagangan Illegal Harimau Sumatera
Dan Produk-Produknya
Serta
Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau,
Badak Dan Gajah**

Cipayung, Bogor 5 – 8 Agustus 2002



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lt 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270 - Telp/Fax. (021) 5720227

SAMBUTAN DAN ARAHAN
DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sungguh merupakan suatu hal yang patut mendapat acungan jempol, bahwa dalam kancah perjuangan di bidang konservasi hayati di Indonesia pada era kini, masih ada kebersamaan antara Pemerintah; Lembaga Swadaya Masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional; Organisasi Non Pemerintah; Pemerhati dan Pihak-pihak yang peduli terhadap konservasi hayati di Indonesia, yang begitu gigih mempertahankan eksistensi Harimau, Badak, dan Gajah.

Kebersamaan termaksud, diaktualisasikan dalam bentuk penyelenggaraan "Lokakarya Anti Perburuan dan Perdagangan Illegal Harimau Sumatera dan Produk-produknya serta Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau, Badak, dan Gajah" yang dilaksanakan di Wisma Jaya Raya - Cipayung, Bogor pada tanggal 5 - 8 Agustus 2002.

Hasil-hasil Lokakarya sebagaimana tercantum dalam Prosiding ini seperti: Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa produk-produk satwa liar hasil penegakan hukum; Rumusan Lokakarya; Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau, Badak, dan Gajah; dan Kesepakatan Peserta Lokakarya, merupakan wujud nyata bahwa, kebersamaan tersebut dapat mengkristalkan ide-ide; gagasan-gagasan; pemikiran-pemikiran; dan rencana-rencana aksi yang memadai dalam konservasi Harimau, Badak, dan Gajah.

Memperhatikan dan mencermati hasil-hasil Lokakarya tersebut, kami harapkan seluruh personil dan institusi Lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Wilayah/Daerah pada khususnya, dan Lingkup Departemen Kehutanan pada umumnya, serta seluruh Instansi/Lembaga/Dinas/Institusi/Pihak terkait yang peduli di bidang konservasi hayati, agar menggunakan; mempedomani; dan menindaklanjuti apa yang telah dirumuskan dan disepakati dalam lokakarya tersebut di wilayah kerjanya masing-masing.

Kami harapkan pula, kiranya Prosiding Lokakarya ini menjadi "dokumen hidup" yang terus tumbuh; berbunga; berbuah; dan menyebar, khususnya dalam hal konservasi Harimau; Badak; dan Gajah.

Kepada seluruh Pihak yang telah berperan serta dalam persiapan; pelaksanaan; pemantauan; dan pelaporan Lokakarya ini, khususnya kepada Panitia Pelaksana dan The Tiger Foundation selaku penyandang dana, kami atas nama Pimpinan dan seluruh staf di jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, menyampaikan "salut" dan penghargaan serta terima kasih atas jerih payah dan karya yang telah dihasilkan.

Kami harapkan, kebersamaan semacam ini terus dibina dan terpelihara, serta terjalin secara berkesinambungan, dan terlebih dapat dibudayakan disetiap pekerjaan dan perjuangan.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menyertai kita.

Jakarta, 11 Desember 2002
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati



Ir. Adi Susmianto, MSc.
NIP. 080054813

FOREWORD BY THE DIRECTOR OF BIODIVERSITY CONSERVATION

It is truly commendable fact that, in our era's struggle to conserve Indonesia's biodiversity, there remains strong collaboration between the Government and civil-society groups (both local, national and international); non-governmental organisations; conservers and other specific parties with a common concern for the preservation of Indonesia's biodiversity, and that these collaborators can, with such vigour, strive to ensure the survival of our tigers, rhinos and elephants.

This collaboration has been crystallised in the holding of this "Workshop on Anti-Poaching and Trade in the Sumatran Tiger, and the Declaration of the Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants", held in the Wisma Jaya Raya of Cipayung, Bogor, on the 5-8th August 2002.

The results of the workshop as outlined in these proceedings include the following: The official donation of illegal wildlife products originating from their seizure through law enforcement; the summary and recommendations of the workshop; the declaration of the Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants; and a vision and agreement signed by all participants; together these represent a manifestation of how this collaboration can lead to the crystallisation of ideas, concerns, thoughts and action plans relating to the conservation of tigers, rhinos and elephants.

In relation to the outputs of this workshop, we hope that all personnel and institutions of the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, both at a central and regional level, the Department of Forestry in general, and also all other relevant organisations, groups and individuals that are concerned with biodiversity conservation, will utilise, promote and carry forwards in their respective regions, all that which has been developed and agreed in this workshop.

We also hope that the proceedings of the workshop will become a "living document" that will continue to grow, flower and fruit as its relevance is expanded in the fields of tiger, rhino and elephant conservation.

To all parties that have assisted in the preparations, implementation, monitoring and reporting of this workshop, in particular to the Organising Committee, and to The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust as the sponsor, we on behalf of the Head and all staff of the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, offer our congratulations, respect and thanks for all the considerable effort involved.

We hope that collaboration such as that represented by this workshop can be further promoted and developed, in a true spirit of cooperation, and if possible be promoted as a common feature in other fields and common struggles.

May God bless and protect us all.

Jakarta, 11 December 2002
Director of Biodiversity Conservation



Ir. Adi Susmianto, MSc.
NIP. 080054813

RINGKASAN



Di sini disajikan... (The text is very faint and difficult to read, but appears to be a summary or abstract of the document's content.)

RINGKASAN

Lokakarya Anti Perburuan Dan Perdagangan Illegal Harimau Sumatera Dan Produk-Produknya Serta Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau, Badak dan Gajah diselenggarakan dengan tujuan untuk menyatukan gerak langkah yang pasti dan terkoordinir untuk menghentikan praktek-praktek kepemilikan, perburuan dan perdagangan ilegal terhadap Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Gajah Sumatera.

Lokakarya ini merupakan salah satu agenda kegiatan Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan The Tiger Foundation, Canada yang telah dituangkan dalam MoU tanggal 22 Januari 2002.

Pelaksanaan lokakarya dilakukan atas kerjasama Direktorat Jenderal PHKA, The Tiger Foundation, The Cites Tiger Task Force dan Jaringan Advokasi Harimau Badak dan Gajah. Peserta yang hadir dan mengikuti lokakarya terdiri dari berbagai Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah Nasional dan Internasional, Lembaga Pendidikan, dan Pakar Konservasi. Selain itu juga dilakukan peliputan oleh berbagai media massa.

Pada acara pembukaan Lokakarya Anti Perburuan Dan Perdagangan Illegal Harimau Sumatera Dan Produk-Produknya Serta Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau, Badak dan Gajah telah dilakukan "Pembakaran Offsetan Harimau Sumatera dan Satwa Liar Dilindungi lainnya".



Doc. STCP 2002



Doc. STCP 2002

Kegiatan pembakaran ini sebagai merupakan simbol keseriusan dan komitmen dari Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah Nasional dan Internasional, Jaringan Advokasi Harimau, Badak dan Gajah, Lembaga Pendidikan dan Pakar Konservasi alam yang peduli terhadap kelestarian alam sepakat untuk memerangi segala bentuk perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Gajah Sumatera secara ilegal.

Salah satu misi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam mengawetkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menyelenggarakan pengawetan plasma nutfah/genetik, spesies dan ekosistem, dengan sasaran : 1) terjaganya kemurnian genetik serta keanekaragaman spesies dan ekosistem 2) terhindarkannya kepunahan jenis tumbuhan dan satwa serta terjaganya kemantapan dinamika populasi 3) terpeliharanya keseimbangan dan kemantapan ekosistem.

Kebijaksanaan dan strategi untuk mencapai tujuan dilaksanakan dengan cara mengelola dan membina jenis tumbuhan dan satwa in-situ dan eksitu, terutama jenis-jenis terancam punah serta mengelola keterwakilan ekosistem dalam kawasan konservasi. Perlindungan dan pengamanan hutan dan ekosistem dari gangguan daya alam dan manusia serta penegakan hukum KSDAHE merupakan kegiatan pokok yang terintegrasi dengan kegiatan pokok PHKA lainnya.

Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan melalui tahapan : operasi intelejen untuk pengumpulan bahan dan keterangan tentang pelaku dan pendukung terjadinya tindak pidana bidang konservasi alam, pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi alam, patroli dalam rangka mencegah terlaksananya tindak pidana konservasi alam, kegiatan pemeriksaan atau pengawasan terhadap kelengkapan dokumen keabsahan hasil hutan dan satwa liar, operasi represif dalam rangka tindakan hukum, operasi rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan masyarakat dan penyuluhan dan operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjaga keutuhan jenis dan keanekaragaman hayati yang kita miliki POLRI selaku lembaga pemerintah tidak pernah akan ragu-ragu untuk menjadi salah satu agen pemelihara dan penjaga kelestarian alam dengan segenap keanekaragaman hayatinya. Dalam tatanan operasional POLRI secara terkoordinasi melaksanakan upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor, termasuk diantaranya : melindungi industri masyarakat dan kehidupan, mencegah perdagangan ilegal, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari berbagai institusi.

Langkah antisipasi penyelundupan ekspor/impor tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dengan cara pengawasan administratif dan fisik. Pengawasan secara administrasi dilakukan dengan penelitian dokumen yang lebih memperhatikan pada ketentuan larangan dan pembatasan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen di pelabuhan. Sedangkan pengawasan secara fisik dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang terkena jalur merah.

Perburuan, pemilikan dan perdagangan Harimau, Badak dan Gajah Sumatera beserta produk-produknya yang dilakukan secara illegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana melanggar Undang-Undang KSDAH Nomor 5 Tahun 1990 dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sesuai dengan KUHP Tahun 1981 maka Jaksa selaku penuntut umum siap menangani perkara ini jika telah ada hasil penyidikan oleh PPNS Departemen Kehutanan dan atau Penyidik POLRI.

Selain itu dalam mengatasi perburuan dan perdagangan illegal Harimau, Badak dan Gajah Sumatera beserta produk-produknya, Kejaksaan dapat berperan untuk : memberikan pendapat di dalam rapat koordinasi tentang upaya mengatasi perburuan dan perdagangan illegal satwa yang dilindungi, ikut membantu operasi penindakan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, melakukan penyuluhan hukum, memberi petunjuk terhadap penanganan penyidikan, menuntut perkara yang diterima dari penyidik ke Pengadilan dan mengeksekusi putusan Hakim.

Daerah otonom terdiri atas Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi dan Daerah Kabupaten/Daerah Kota. Masing-masing daerah otonom berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain, tetapi mempunyai hubungan koordinasi, kerjasama dan kemitraan. Daerah otonom mempunyai keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah termasuk di dalamnya adalah urusan satwa liar yang dilindungi. Adapun demikian Pemerintah Daerah tetap turut serta dalam menjaga asset nasional berupa perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Kewenangan Pemerintah Daerah yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi merupakan peran yang besar dalam menjaga kelestarian satwa liar harimau dan habitatnya.

Pengelolaan satwa liar khususnya harimau sumatera secara institusi pemerintahan ditangani oleh Balai/Unit Taman Nasional dan Balai/Unit KSDA diantaranya dalam bentuk pengelolaan kawasan konservasi, pengawasan peredaran satwa liar, perlindungan dan pengamanan satwa liar, penyuluhan kepada masyarakat secara terbatas, dan melakukan pembinaan kepada pedagang dan penangkar satwa liar.

Dalam rangka mendukung penegakan hukum bidang konservasi, Program Konservasi Badak Indonesia melalui Team RPU (yang terdiri dari unsur Polhut, NGO dan Masyarakat) di TNKS, TNBBS, TNWK dan TNUK telah melakukan kegiatan patroli perlindungan badak dan habitatnya secara rutin dan intensif dengan frekwensi patroli lapangan setiap bulan rata-rata 14,6 hari dengan jarak tempuh 15.354 km. Kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam mencegah dan menanggulangi perburuan liar.

The CITES Tiger Task Force mengungkapkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam penyelesaian perkara dibidang tindak pidana konservasi alam diperlukan kemampuan petugas dibidang kepolisian dan ketaatan dalam mengikuti prosedur penanganan perkara dan ini membutuhkan waktu yang relatif lama.

Untuk mendukung upaya konservasi harimau sumatera The Tiger Foundation telah melakukan monitoring dan identifikasi individu dan populasi harimau sumatera di Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Selain itu adanya partisipasi dari perusahaan kelapa sawit seperti PT Asiatic Persada yang telah menyisihkan sebagian areal perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya untuk areal perlindungan harimau sumatera dan satwa liar lainnya telah menambah habitat dan daerah perlindungan harimau yang semakin sempit.

Akibat menurunnya kualitas habitat dan berkurangnya populasi satwa mangsa telah menyebabkan terjadinya konflik antara harimau dengan manusia. Kegiatan utama yang dilakukan oleh Jajaran Instansi Kehutanan di Propinsi Riau untuk menanggulangi gangguan harimau sumatera terhadap masyarakat masih terbatas pada kegiatan penangkapan dengan perangkap dan mengirimkannya ke lembaga konservasi satwa.

Pada areal hak pengusahaan hutan seperti HPH PT. Asia Log di Propinsi Jambi ancaman terhadap keberadaan satwa liar terutama harimau sumatera terjadi secara internal dan eksternal. Ancaman internal terutama timbul dari aktivitas keberadaan perusahaan untuk kepentingan pembukaan lahan dan alih fungsi hutan serta aktivitas penebangan dan pembukaan jalan. Sedangkan ancaman eksternal terjadi karena keberadaan masyarakat asli yang hidup dari memanfaatkan sumber daya alam seperti berburu dan bertani tradisional dan kegiatan illegal logging serta perambahan hutan oleh masyarakat pendatang.

Selain itu adanya sebagian dari masyarakat di Propinsi Sumatera Utara yang masih percaya bahwa bagian-bagian tubuh harimau mempunyai kelebihan secara mistis, telah mendorong untuk terjadinya perburuan harimau sumatera secara illegal.

Perburuan liar di Propinsi Bengkulu masih terus berlangsung bahkan untuk beberapa jenis satwa liar seperti Harimau, Badak dan gajah telah terorganisasi dengan rapih atau berupa sindikat yang melibatkan cukong cukong di dalam propinsi, nasional bahkan internasional.

Pengalaman Program Konservasi Badak Indonesia dalam pengoperasian RPU untuk memberikan perlindungan satwa badak masalah yang sangat menonjol adalah : perambahan hutan dan illegal logging/pencurian kayu yang apabila tertangkap cenderung melakukan amuk massa yang tidak terkendali, kelanjutan dari proses perkara dari kasus yang berhasil diungkap kurang transparan atau hasil putusan pengadilan sangat tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Belum adanya serta terbatasnya tenaga PPNS yang berkualitas, terbatasnya sarana mobilitas dan transportasi, adanya backing atau pejabat yang mendukung peredaran dan perdagangan satwa liar dilindungi seperti harimau, rendahnya kesadaran masyarakat akan konservasi alam, kondisi sosial ekonomi dan politik dan keawatiran terjadinya amuk massa telah menyebabkan tidak optimalnya upaya penegakan hukum dibidang konservasi alam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka melalui pembahasan dan diskusi dari berbagai institusi pemerintah, organisasi non pemerintah nasional dan internasional, lembaga pendidikan dan pakar konservasi alam yang hadir dalam lokakarya telah dihasilkan rekomendasi dan rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen informasi dan pangkalan data mengenai harimau Sumatera, badak Sumatera dan gajah Sumatera (HBG) dengan prioritas pada aspek-aspek perburuan, perdagangan dan kepemilikan, serta populasi, distribusi, habitat, konflik dan ancaman potensial terhadap HBG dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum.
2. Melaksanakan pembaruan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya PPNS dan Polhut, sehingga memberikan dampak kepada peningkatan budaya hukum di dalam masyarakat.
3. Mendorong pembuatan Instruksi Presiden dan peraturan pelaksanaannya di setiap kementerian terkait, khususnya Instruksi Menteri Kehutanan dalam rangka memerkuat upaya penegakan hukum perlindungan HBG dan mendorong gerakan nasional peduli konservasi HBG.
4. Membangun proses penegakan hukum terpadu yang melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat, Polhut/PPNS, POLRI, TNI, Kejaksaan, pengadilan, LSM/JAHBG dan media masa, khususnya dalam rangka memerangi perburuan dan perdagangan HBG.
5. Melaksanakan pendampingan hukum kasus-kasus besar dalam rangka membangun preseden hukum melalui penerapan sanksi yang berat.
6. Peningkatan kapasitas dan peran aktif LSM dan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan program kerja Jaringan Advokasi HBG dalam rangka penegakan hukum perlindungan HBG.
7. Menyusun protokol penanganan kepemilikan pribadi maupun komersial satwa liar baik hidup maupun mati dan atau bagian-bagian tubuhnya, khususnya HBG.
8. Menyusun protokol penanganan konflik manusia dengan satwa liar, untuk menjamin keselamatan HBG dan kesejahteraan masyarakat.

9. Menggali dan memperkuat kearifan masyarakat adat dan lokal dalam rangka mendukung konservasi HBG.
10. Mengembangkan strategi kampanye dan penjangkauan masyarakat disesuaikan dengan kelompok sasaran.
11. Memperluas kawasan konservasi bagi HBG yang merupakan satwa payung bagi jenis-jenis satwa liar lainnya, sebagai salah satu upaya penanganan HBG dalam habitat yang terisolasi.
12. Mengembangkan mekanisme 'reward' and 'punishment' (penghargaan dan hukuman) bagi aparat penegak hukum.

Summary

The workshop on Anti-poaching and Illegal Trade in the Sumatran Tiger and its Products, and the Declaration of the Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants, is held with the goal of synthesizing and coordinating efforts focused on stopping the illegal practices of poaching, trading and transit in Sumatran Tiger, rhinoceros and wildcat.

The workshop represents a priority action of the tiger conservation programme of the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (DPRN) in collaboration with The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust partnership, as outlined in their Memorandum of Understanding signed on the 22nd January 2012.

Organization and execution of the workshop has been a cooperative effort between the Directorate General of DPRN, The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust, the CITES Tiger Task Force and the multi-NGO group under the Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants. Delegates to the workshop represented central and provincial government institutions, international and national non-governmental organisations, educational institutions and conservation experts. In addition the workshop was attended by a broad cross-section of wildlife press and media representatives.

SUMMARY

At the opening ceremony, the workshop was held in the Sumatran Tiger and its Products, and the Declaration of the Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants, a demonstration of the mission was carried out with the active hunting of illegal tiger and other endangered, trafficked wildlife specimens.



Dec 5127-2012



Dec 5127-2012

The hunting witnesses a central of the influence and commitment of government, national and international non-government organisations, the Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants, academic institutions and conservation specialists - vi

Summary

This workshop on Antipoaching and Illegal Trade in the Sumatran Tiger and its Products, and the Declaration of the Advocacy Network for Tigers, Rhino and Elephant, is held with the goal of synchronising and coordinating efforts focused on stopping the illegal practices of possession, poaching and trade in Sumatran tigers, rhinoceros and elephant.

This workshop represents a priority action of the tiger conservation programme of the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (PHKA) in collaboration with The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust partnership, as outlined in their Memorandum of Understanding signed on the 22nd January 2002.

Implementation and execution of the workshop has been a cooperative effort between the Directorate General of PHKA, The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust, the CITES Tiger Task Force and the multi-NGO group known as the Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants. Delegates to the workshop represented central and provincial government institutions, international and national non-governmental organisations, educational institutions and conservation experts. In addition the workshop was attended by a broad cross-section of national press and media representatives.

At the opening ceremony of the workshop on Antipoaching and Illegal Trade in the Sumatran Tiger and its Products, and the Declaration of the Advocacy Network for Tigers, Rhino and Elephant, a demonstration of the mission was carried out with the public burning of stuffed tigers and other endangered, confiscated wildlife specimens.



Doc. STCP 2002



Doc. STCP 2002

This burning represents a symbol of the seriousness and commitment of government, national and international non-government organisations, the Advocacy Network Tigers, Rhinos and Elephants, academic institutions and conservation specialists – in

combating all forms of poaching and illegal trade in Sumatran tigers, rhinos and elephants.

Particular priorities of the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, in the preservation of Indonesia's biodiversity and ecosystems, include the following: 1) to maintain the genetic purity and diversity of species and ecosystems, 2) prevent extinction of flora and fauna and the dynamics of their populations 3) sustain the balance and sanctity of ecosystems.

Strategies and initiatives to achieve the above goals include the conservation management and preservation of flora and fauna in in-situ and ex-situ contexts, in particular where the species are threatened with extinction or are particularly critical components of the habitat areas they represent. Protection and security of forests and ecosystems from natural and anthropogenic threats, including the enforcement of law related to conservation of natural resources, represents the highest priority of the integrated conservation strategy of the PHKA.

Appropriate conservation and protection of flora and fauna is implemented through a series of steps: Intelligence operations to collate evidence relating to suspects involved in wildlife and natural resources crime, outreach programmes to improve the conservation awareness of the general public, protection patrols to prevent the actual crimes in the field, stringent checks and monitoring of administration and permits related to the extraction of natural resources, preventative and repressive operations to combat crimes occurring, and the rehabilitation and provision of alternatives for local people that have become dependent upon such illegal activities.

Within the scope of protecting Indonesian biodiversity and habitats POLRI, as a government institution, is clearly a primary agent of protection and preservation of natural resources. Within its standard operational procedures and terms-of-reference POLRI carries out pre-emptive, preventative and repressive measures to combat the above threats.

The Directorate General of Customs and Excise also has a role and responsibility in monitoring the import and export of goods to and from Indonesia, including: the protection of industry, general public and the environment, prevention of illegal trade and the implementation of laws and regulations from many other government institutions.

Anticipation of the smuggling of endangered flora and fauna is carried out through both administrative and physical monitoring. On the administrative side, shipping documents are cross-checked in relation to current laws and regulations by the relevant officials at the port of entry and exit. Physical checks are carried out on the

goods which have been transported through the "red" customs channels at these ports.

The illegal poaching, possession and trade in tigers, rhinoceros and elephant and their derived products is a punishable crime as defined under the Law on Conservation of Natural Resources No. 5 of 1990. In accordance with KUHAP of 1981 the state prosecutor is responsible to see such crimes tried before court providing that the case and evidence brought by investigating officials (PPNS) of the Department of Forestry or the investigating officer of the Police Department is deemed adequate.

In addition to this, in the combating of poaching and illegal trade in tigers, rhinoceros and elephant and their products, the state prosecutor has other responsibilities: provide guidance and expert opinion in coordination meetings to prevent poaching and trade of protected species, assist in the investigations and prosecution cases carried out by the responsible agencies, promote awareness of relevant laws to all relevant parties, provide guidance to investigators, prosecute cases that are received through to court, and the execution of sentencing as required by the judge.

Regional autonomy in Indonesia is represented by the Province, its regional administration and its component regions, districts and metropolitan areas. By definition each autonomous region exists in hierarchical isolation of others, yet maintains a relationship of coordination, cooperation and partnership. The autonomous region has freedom to implement local government policy in all areas except those of foreign policy, defense, justice, fiscal and monetary issues, religion and also other fields as identified by specific national government regulations, including the protection of endangered species. Despite this centralisation of conservation, the autonomous regions also have a large responsibility in the protection of national assets, such as those represented by endangered species and habitats.

The responsibilities of regional government as planners, implementors, monitors and evaluators of activities within the provinces, provide a strong platform for the protection and conservation of species and their habitats.

The management of wildlife, particularly the Sumatran tiger, is officially the government responsibility of national park and regional conservation of natural resources management offices, and includes the direct management of protected and conservation areas, the monitoring of trade in wildlife, the protection and preservation of wild species, the development of conservation awareness in neighbouring human communities, and the education and monitoring of traders and keepers of wildlife.

As a component of the overall goal of facilitating law enforcement related to conservation, the Indonesian Rhino Conservation Program through its activities of Rhino Protection Units (RPU; consisting of Forest Police, representatives of NGOs and local people) has been operating in the Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan, Way Kambas and Ujung Kulon National Parks. Their routine patrols to protect rhinos and their habitat have achieved an intensity and frequency of patrol equivalent to approximately 14.6 days per team per month, covering a total distance of over 15,354 km. Such activities have clearly demonstrated success in preventing and handling of wildlife poaching.

The CITES Tiger Task Force has identified that, in order to reach a level of success in prosecution through to appropriate sentencing of conservation criminals, the effectiveness of staff in the fields of policing and processing of evidence and cases needs to be raised significantly. This will require some considerable time and effort.

In the support of Sumatran tiger conservation efforts The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust partnership, amongst others, is carrying out intensive monitoring, protection and management of individual tigers and populations in Way Kambas and Bukit Tigapuluh National Parks. In addition to this a recent participation by the PT Asiatic Persada oil palm plantation company, by the setting aside of proportion of its land for the conservation of a resident tiger population, has expanded the currently limited geographical range of the Sumatran tiger.

One of the outcomes of decreasing habitat quality and reduction in available prey base is an increase in incidences of conflict between tigers and people. Related to this the Forestry Department of Riau province handles cases of local community disturbance by the Sumatran tiger, but remains limited to capturing of the "problem" tiger and its transferral to an ex-situ conservation facility (i.e. zoo).

In forest logging concession areas like PT Asia Log in Jambi province, the threats to wildlife, particularly the Sumatran tiger, are represented by both internal and external factors. Internal threats arise as a direct result of the activities of the logging concession company, from the opening of new land areas to commercial activities, from the changing function of the forest area, and as a result of tree-felling and increased access via logging roads. External threats arise as a result of the changing role of indigenous and local peoples which have previously existed in relative harmony through only small scale hunting and farming, and also from the effects of illegal logging and uncontrolled encroachment by more recent human settlers.

Other threats from local people are more specific, for example some clans in North Sumatra province still believe that body parts of the tiger confer mystical powers, providing a further impetus for uncontrolled poaching.

Wildlife poaching in Bengkulu province continues unabated, while for the tiger, rhino and elephant there is much evidence that poaching operations are characterised by increasing organisation and stronger backing, through both dedicated national and international middle-men and contact persons.

The experience of the Indonesian Rhino Conservation Program, with the operation of Rhino Protection Units (RPU) as a safeguard against poaching of rhinos, identifies several important threats: encroachment of forest and illegal logging which, on capture of suspects, often leads to uncontrolled demonstrations and anger by local groups; the legal follow-up after capturing of suspects where legal processing is often lacking in transparency or where the final sentencing is far from sufficient to provide a disincentive to further crime.

A shortfall and lack of quality personnel in the legal processing and investigatory teams of the Forestry Department, insufficient facilities including transportation for rangers, the high level backing by government officials of some illegal activities such as trade and distribution of endangered species, the low awareness and concern of local people for conservation in general, socioeconomic and political conditions, and also the large-scale mobilisation of local people in response to capture – all of these factors have prevented the optimal enforcement of law related to conservation crimes.

In the process of identifying and combating these issues which currently limit the effectiveness of law enforcement related to conservation, by a process of discussion and dialogue between the workshop delegates representing government institutions, national and international non-government organisations, academic institutions and conservation experts, several recommendations and action priorities have been identified:

1. Develop a system of information management relating to the Sumatran tiger, Sumatran rhino and Sumatran elephant (HGB) with a focus on aspects related to poaching, trade and possession, and also population, distribution, habitat, conflict and potential threats to HGB insofar as to assist efforts related to the effective enforcement of conservation law.
2. Carry out a review and revision of current conservation laws, increase capacity and focus of law enforcement bodies, in particular PPNS and Forest Police,

with the goal of raising awareness and application of conservation law across the public domain.

3. Facilitate the development of a Presidential Instruction and associated implementation procedures across related Ministries, specifically including an Instruction of the Ministry of Forestry, with the goal of strengthening current law enforcement issues related to HBG as well as initiating a national movement of concern regarding these species' conservation.
4. Develop a process of integrated law enforcement that involves all stakeholders, including local people, Forest Police/PPNS, Police, Armed Forces, Justice Department, Criminal Courts, the media and non-governmental organisations (including the Advocacy Network for HBG), all with the common goal of fighting against poaching and trading of HBG.
5. Provide legal assistance to prosecuting teams on important cases, with the goal of setting legal precedents through proper and heavy sentencing.
6. Increase the capacity and active role of NGOs and the general public on conservation of HBG, through a process of developing institutional capacity, including the working program and capacity of the Advocacy Network for HBG.
7. Develop an effective protocol for the monitoring of private possession and commercial possession of wildlife and their products, both living and dead, and specifically related to HBG.
8. Develop a protocol for the handling of conflict between humans and wildlife, in order to assure security of both wildlife and the existence and of human communities.
9. Promote and develop the welfare of local traditional people as a component of an integrated strategy of conservation of HBG.
10. Develop a strategic campaign of outreach for the general public in accordance with conservation needs and identified target groups.
11. Extend and expand the conservation areas available for HBG which themselves can serve as an umbrella for other wildlife species, as one effective means of conserving wild HBG in isolated habitats.
12. Develop mechanisms of reward and punishment for those personnel and institutions involved in conservation law enforcement

KATA PENGANTAR

Yang terhormat para pemimpin dan seluruh anggota Tuhan Yang Maha Esa, para pejabat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas. Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pemimpin dan seluruh anggota Tuhan Yang Maha Esa, para pejabat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas. Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pemimpin dan seluruh anggota Tuhan Yang Maha Esa, para pejabat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas.

Dalam rangka memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-73, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pemimpin dan seluruh anggota Tuhan Yang Maha Esa, para pejabat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas.

Dalam rangka memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-73, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pemimpin dan seluruh anggota Tuhan Yang Maha Esa, para pejabat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas.

1. Sekretaris Panitia Lokakarya yang diemban oleh Drs. Sri Partidjaya, dan
2. Ketua Panitia Lokakarya yang diemban oleh Drs. Sri Partidjaya, dan

KATA PENGANTAR

3. Ketua Panitia Lokakarya yang diemban oleh Drs. Sri Partidjaya, dan
4. Wakil Ketua Panitia Lokakarya yang diemban oleh Drs. Sri Partidjaya, dan
5. Sekretaris Panitia Lokakarya yang diemban oleh Drs. Sri Partidjaya, dan

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pemimpin dan seluruh anggota Tuhan Yang Maha Esa, para pejabat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas.

Semoga dalam rangka hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-73, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pemimpin dan seluruh anggota Tuhan Yang Maha Esa, para pejabat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas.

Bojonegara, 5 November 2012

Kata Panitia Lokakarya

Drs. Dewati Wulandari, S.Si, M.Sc, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami selaku Ketua Panitia Pelaksana " **Lokakarya Anti Perburuan dan Perdagangan Illegal Harimau Sumatera dan Produk-produknya serta Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau, Badak dan Gajah** " yang dilaksanakan di Wisma Jaya Raya – Cipayung, Bogor pada tanggal 5 – 8 Agustus 2002, dapat menyelesaikan prosiding lokakarya meskipun terlambat dari jadwal yang direncanakan.

Disadari bahwa prosiding ini kurang memenuhi harapan bagi berbagai pihak yang berkaitan, baik isi maupun penyajiannya. Namun besar harapan kami, kiranya dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukan serta ditindaklanjuti oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Khusus dalam penyiapan dan pembuatan prosiding ini, kami ucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada rekan – rekan :

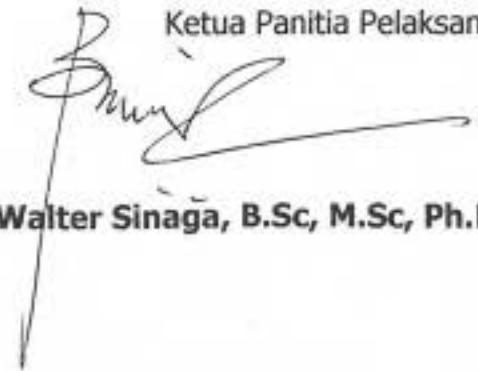
1. Sekretariat Panitia Lokakarya yang dikoordinir oleh Dra. Siti Fadhliyah, atas dukungan Ir. Maraden Purba, MM – Kepala Balai KSDA DKI Jakarta;
2. Neil Franklin, D. Phil. – Director The Tiger Foundation;
3. Ir. Waldemar Hasiholan, M.Si – Program Manager Konservasi Harimau Sumatera – The Tiger Foundation;
4. Winda Yuniria Diah Ikasari, SH. – Staf Program Konservasi Harimau Sumatera, yang dengan kesungguhannya telah mengetik kembali sebagian besar dari bahan dan materi lokakarya;
5. Rekan – rekan lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan dan tuliskan satu per satu di lembar ini;

Kiranya kasih dan berkat dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, tercurah pada rekan – rekan sekalian.

Semoga dalam benak dan nafas kehidupan peserta lokakarya, tetap tumbuh, berkembang dan berbuah tentang apa yang telah disepakati dan dideklarasikan. "Pasti dan Selamat Berkarya".

Bogor, 6 November 2002

Ketua Panitia Pelaksana,



Ir. Daniel Walter Sinaga, B.Sc, M.Sc, Ph.D

FOREWORD FROM THE EDITOR

This book is a collection of papers presented at the International Conference on the Conservation of the Tiger, which was held in Kuala Lumpur, Malaysia, in 1997. The book is a tribute to the tiger, a magnificent and majestic animal, and to the people who have dedicated their lives to its conservation. It is a book that will inspire and inform, and it is a book that will be read and enjoyed for many years to come.

The book is divided into two parts. The first part contains the papers presented at the conference, and the second part contains the book's introduction and conclusion. The papers are arranged in chronological order, and they cover a wide range of topics, including the tiger's biology, its distribution, its conservation, and its role in the ecosystem. The book is a valuable resource for anyone who is interested in the tiger, and it is a book that will be read and enjoyed for many years to come.

In view of the fact that the tiger is a species that is becoming increasingly rare, it is important that we do our best to conserve it. This book is a tribute to the tiger, and it is a book that will inspire and inform. It is a book that will be read and enjoyed for many years to come. The tiger is a magnificent and majestic animal, and it is a book that will inspire and inform. It is a book that will be read and enjoyed for many years to come.

FORE WORD

The editor and publisher thank the Director General of Forests, Ministry of Forests, Malaysia, and the Director of the Department of Wildlife and Fisheries, Ministry of Natural Resources, Malaysia, for their kind assistance and support in the preparation of this book. The editor and publisher also thank the following individuals for their kind assistance and support in the preparation of this book: [Names of individuals]

Kuala Lumpur, Malaysia, 1997



Editor

Director, Wildlife Department

Kuala Lumpur, Malaysia

FOREWORD FROM THE SPONSOR

Both as a national priority as outlined in the Indonesian Sumatran Tiger Conservation Strategy (PHKA 1994), and as a component of the Sumatran Tiger Conservation Program (*Program Konservasi Harimau Sumatera*), the eradication of poaching, trafficking and illegal possession is considered a critical step in ensuring the future survival of tigers in Sumatra. The same factors are recognised as equally important in the conservation of the endangered Sumatran rhinoceros and elephant, as all three species face almost identical threats, struggling to exist within diminishing and highly fragmented habitats.

Under the umbrella of our joint collaborative tiger conservation activities with the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, it is with great pleasure that the Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust partnership is able to sponsor this important event focused on the above goals. With the participation of stakeholders from both national and provincial levels of government, and from a wide range of disciplines and institutions, it is hoped that the workshop will provide a facilitatory forum for identifying current weaknesses, while providing a framework for mobilising efforts towards effective conservation action.

In view of this it is particularly commendable that the Indonesian Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants, as a synergistic gathering of concerned non-governmental organisations working towards common conservation goals, has been a driving force in the implementation, organisation and follow-up of this workshop. The Tiger Foundation/Sumatran Tiger Trust partnership, under the umbrella of the Sumatran Tiger Conservation Program, is pleased to be part of supporting this productive synergy between government and non-government organisations and believes that the future of the tiger, rhino and elephant rests in such collaboration and common vision.

We offer our sincere thanks to the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, and to the Secretariat of the Workshop, as hosts and organisers of this event. It is hoped that the clear directives and recommendations resulting from this workshop can be formalised into concrete steps to ensure the tiger, rhino and elephant's long-term future in Indonesia.

Minnesota, 6 November 2002



Ronald Tilson Ph.D

Chairman, The Tiger Foundation/
Sumatran Tiger Trust

DAFTAR ISI

	Halaman
REKASAN	i
Summary	ii
KATA PENGANTAR	xii
Foreword From The Sponsor	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPUAN	xxi
SAMULTAN HENTERI KERUTANAN	xxii
RUMUSAN LOMAKIYA	xxiii
Recommendation	xxiv
KESERKATAN PESERTA LOMAKIYA	xxv
Agreement of Participants	xxvi
DEKLARASI JAHIS	xxvii
Declaration of JAHIS	xxviii
BERTAKARA PEYALAMANAN	xxix
Agreement Method	xxx
I. BENDAHUJIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Waktu dan Tempat	2
E. Pendekatan	2
II. DESKRIPSI LOMAKIYA	3
A. Misi	3
B. Pembentukan Organisasi Harian	4
C. Struktur dan Bidang Kegiatan	4
D. Perencanaan Deklarasi JAHIS	5
E. Perencanaan dan Pelaksanaan	5
F. Kesimpulan	5
III. BERTAKARA ACARA	6
LAMPUAN – LAMPUAN	11

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
Summary	vii
KATA PENGANTAR	xiii
Foreword From The Sponsor	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN	xvii
RUMUSAN LOKAKARYA	xxi
Recommendation	xxviii
KESEPAKATAN PESERTA LOKAKARYA	xxx
Agreement of Participants	xxxiii
DEKLARASI JAHBG	xxxix
Declaration of JAHBG	xli
BERITA ACARA PEMUSNAHAN	xliii
Jurisdiction Release	xlvi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Topik	2
D. Waktu dan Tempat	2
E. Pembiayaan	2
II DISKRIPSI LOKAKARYA	3
A. Materi	3
B. Pembakaran Offsetan Harimau	4
C. Diskusi dan Sidang Kelompok	4
D. Pembacaan Deklarasi JAHBG	4
E. Penandatanganan Kesepakatan	5
F. Kesimpulan	5
III SUSUNAN ACARA	6
LAMPIRAN – LAMPIRAN	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Daftar Undangan dan Peserta Lokakarya	11
B. Strategi Konservasi	18
C. Konservasi Insitu dan Eksitu	34
D. Sistem Perlindungan Hutan	37
E. Peranan POLRI	52
F. Peranan Kejaksaan	61
G. Peranan Ditjend. Bea dan Cukai	66
H. Peranan Otonomi Daerah	74
I. Tinjauan Kebijakan Hukum	80
J. Peranan Satuan CITES Tiger Task Force	92
K. Lessons from Bali, Java and now China : The future of tigers...	105
L. Peranan Dinas Kehutanan Propinsi Riau	110
M. Pemberdayaan Masyarakat di BKSDA Sumut II	147
N. Upaya Penegakan Hukum di BKSDA Bengkulu	157
O. Upaya Penegakan Hukum di Balai TNKS	161
P. Permasalahan Konservasi di Balai TNBBS	170
Q. Upaya Penegakan Hukum di Balai KSDA DKI	184
R. Peranan Program PKBI Dalam Penegakan Hukum	200
S. Sisa Populasi Harimau Sumatera	215
T. Daftar Massmedia Yang Meliput Lokakarya	223
U. Surat Keputusan Penyelenggaraan Lokakarya	252
V. Daftar Penceramah	263
W. Daftar Alamat Peserta	273
X. Penyampaian Laporan dan Pembubaran Panitia	289

SAMBUTAN
 MENTERI KEHUTANAN
 PADA ACARA PEMBERIAN
 LOKAKARYA ANTI PEMBUNYIAN DAN PENGACANGAN ILEGAL
 HARIMAU SUMATERA DAN PRODUK-PRODUKNYA
 2002
 DEKLARASI JARINGAN ADVOKASI HARIHAI, BAKAR DAN
 GABRI

Copying 5 - 8 Agustus 2002

Assalamu'alaikum W.C.W.
 Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Hadirin yang saya hormati,

Pada hari ini saya sangat bangga dan bangga bahwa pada hari ini semua kita berkumpul pada acara lokakarya anti pembunyan dan pengacangan ilegal harimau Sumatera dan produk-produknya serta deklarasi jaringan advokasi harimau, bakas dan gabri.

Sedangkan kita ketahui bahwa Indonesia telah diakui sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat beragam (keutuhan) yang sangat tinggi sehingga menimbulkan suatu kekhawatiran yang mendalam bahwa keanekaragaman hayati akan semakin berkurang karena ancaman pembunyan dan pengacangan ilegal harimau Sumatera dan produk-produknya.

SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN

Keberagaman hayati yang sangat beragam yang merupakan keutuhan hayati merupakan kekayaan alam yang sangat penting yang harus kita jaga dan pertahankan.

Keberagaman hayati yang sangat beragam yang merupakan keutuhan hayati merupakan kekayaan alam yang sangat penting yang harus kita jaga dan pertahankan.

Selain itu yang harus kita ketahui bahwa keutuhan hayati merupakan kekayaan alam yang sangat penting yang harus kita jaga dan pertahankan.

**Lokakarya Anti-Perburuan dan
Perdagangan Illegal Harimau Sumatera dan
Produk-produknya Serta Deklarasi Jaringan Advokasi
HBG**

Peranan Dinas Kehutanan dalam Upaya
Penyelamatan Harimau Sumatera, Badak Sumatera
dan Gajah Sumatera dan Habitat Alaminya dalam
Kepentingan Pembangunan Propinsi Riau

Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi Riau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan KaruniaNya jua kami dapat menyusun suatu makalah dengan judul "Upaya Pelestarian Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrensis) yang disajikan dalam rangka Lokakarya Anti Perburuan dan Perdagangan Illegal Harimau Sumatera dan Produk-Produknya serta Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau, Badak dan Gajah" yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 - 8 Agustus 2002 di Cipayung - Bogor.

Adapun isi makalah ini pada intinya berupa langkah-langkah umum yang telah dan akan ditempuh dalam mengupayakan Pelestarian Harimau Sumatera dimaksud.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Penyusun,

KEPALA DINAS

Ir. FAUZI SALEH

Pembina Utama Muda
NIP. 420004408

UPAYA PELESTARIAN HARIMAU SUMA'ERA (PANTHERA TIGRIS SUMATRENSIS)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrensis*) adalah salah satu jenis satwa mamalia yang keberadaannya di Propinsi Riau masih menjadi misteri yang menarik untuk diperdebatkan mengenai jumlah, jenis kelamin, persebaran dan habitat yang ideal bagi kehidupan Harimau Sumatera tersebut.

Banyak penelitian dan kegiatan-kegiatan ilmiah yang telah dilakukan untuk melacak misteri yang menarik tentang Harimau Sumatera ini, mulai dari habitatnya, Uji jejak / tapak- dan identifikasi fisiknya secara langsung dilapangan. Namun, yang jelas jenis mamalia ini keberadaannya masih sering dijumpai di Propinsi Riau, walaupun jumlahnya masih menjadi polemik- yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Identifikasi keberadaan Harimau Sumatera ini, mulai menarik- perhatian Rimbawan di Propinsi Riau khususnya yang berada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, setelah berhasil mengelola satwa/mamalia lainnya, misalnya gajah.

Beranjak dari keberhasilan penangkapan dan pengelolaan ini bukan suatu hal yang mustahil, bila dimasa mendatang BKSDA Riau akan berhasil pula mengelola jenis Harimau Sumatera ini seperti halnya mengelola gajah. Agar ide pengelolaan Harimau Sumatera ini dapat terwujud, maka perlu upaya-upaya khusus yang melibatkan banyak instansi terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya makalah ini adalah memberikan gambaran tentang upaya-upaya pelestarian Harimau Sumatera yang dilaksanakan di Propinsi Riau.
2. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah terwujudnya pengelolaan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*) secara berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

2. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
3. Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973.

II. INVENTARISASI HARIMAU SUMATERA (PANTHERA TIGRIS SUMATRENSIS)

A. Inventarisasi Lokasi

Berdasarkan pengalaman dilapangan selama ini, Harimau Sumatera paling menyukai lahan yang cukup berair (tepi sungai), cukup makanan berupa mamalia kelompok herbivora seperti Kijang, Kancil dan sejenisnya serta naungan (tajuk) pohon yang memadai.

Habitat seperti ini banyak dijumpai di kawasan Hutan Lindung, kawasan Margasatwa dan Hutan Wisata atau Taman Buru. Di Propinsi Riau, kawasan yang masih dihuni oleh jenis Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*) ini adalah Hutan Lindung Mahato, Suaka Margasatwa Karumutan, Bukit Bungkuk (Bukit Harimau Hujan), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang - Bukit Baling, Tesso Nilo dan kawasan hutan sejenisnya.

B. Inventarisasi Jumlah dan Umur Harimau Sumatera

Inventarisasi Harimau Sumatera ini dilakukan dengan metode analisa jejak Harimau

Tapak-tapak kaki Harimau Sumatera ini dapat diidentifikasi pada lahan yang gembur dan terbuka, dan akan lebih meyakinkan lagi bila lahan tersebut habis tersiram air hujan.

Ada pertanyaan yang timbul dipikiran, yaitu bagaimana cara membedakan jejak Harimau Sumatera dengan Macan Kumbang (Harimau Dahan), misalnya. Berdasarkan pengalaman jejak Macan Kumbang (Harimau Dahan) jejaknya relatif lebih rapat dan kecil dibanding jejak Harimau Sumatera.

Metode lainnya adalah dengan menghitung langsung Harimau Sumatera yang tertangkap dengan cara dijerat secara tradisional. Cara ini untuk sementara adalah cara inventarisasi jumlah yang paling mudah dilaksanakan dan akurat datanya.

C. Inventarisasi Pola Pergerakan

Hampir seperti Gajah, pola pergerakan Harimau Sumatera juga kadang berkelompok dan biasanya ada satu atau dua ekor sebagai perintis / pembuka jalan, kemudian kelompok yang relatif lebih muda menyusul dari belakang.

Kondisi ini berdasarkan literatur yang ada merupakan penyimpangan pergerakan dari pada pergerakan yang biasanya ditemukan pada Harimau Sumatera terdahulu yang cenderung "solitaire". Mungkin hal ini dikarenakan semakin sempitnya habitat mereka dan populasinya yang semakin menurun, sehingga mereka kemudian berkelompok seperti halnya Gajah Sumatera.

1. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan pada tahun 1999 di kawasan SM. Karimutan, jumlah Harimau Sumatera sebanyak 15 ekor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - Sekitar sungai Merbau = 9 ekor
 - Sekitar sungai Buluh - Galoga = 6 ekor
2. Berdasarkan hasil identifikasi Jagawana/Polhut BKSDA Riau dan laporan masyarakat dikawasan hutan lindung Mahato ada 10 ekor Harimau Sumatera yang dalam pengembaraannya selalu berkelompok dan jalur lintasnya selalu tetap. Harimau ini dapat juga bergerak sampai diperbatasan kawasan hutan Sumatra Utara.
3. Laporan Kepala Desa Kuntu (tahun 2000) menyatakan, bahwa masyarakat setempat melaporkan ditapal batas desa mereka (masih dalam kawasan SM Bukit Rimbang-Bukit Baling) telah pernah diganggu sekawan Harimau Sumatera berjumlah 6 ekor, yang terdiri atas 4 ekor harimau besar dan 2 ekor masih kecil, KRPH Kuntu telah membuktikan kebenaran tersebut dilapangan. Sedangkan di Desa Tanjung Palas 4 ekor Harimau Sumatera berukuran sedang, melahap habis ternak ayam dan kambing masyarakat tetapi tidak sempat tertangkap masyarakat setempat.
4. Harian Riau Pos tanggal 16 Maret 2001 memberitahukan di Kelurahan Batu Teritip Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai (masih dalam kawasan hutan Sinepis) masyarakat dikejutkan dengan kehadiran sekelompok Harimau Sumatera berjumlah 10 ekor bergerak ke tapal batas hutan Sinepis. Diperkirakan pergerakan harimau ini karena semakin menipisnya habitat harimau tersebut karena adanya pembukaan hutan Sinepis yang tidak terkendali.
5. Jagawana dan Polhut RPH Bangkinang yang bertugas pada Pos 1 pengamatan SM. Bukit Bungkuk pada pertengahan bulan Mei 2002 melaporkan sempat menemukan jejak Harimau Sumatera ini yang terdiri dari jejak yang cukup lebar dan ada yang kecil juga. Diperkirakan

jumlahnya tidak lebih dari 5 ekor saja yang bertahan di SM. Bukit Bungkok ini.

D. Gangguan Harimau Sumatera.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang terkena gangguan Harimau Sumatera sejak tahun 1999 sampai dengan September 2001 di Propinsi Riau sebagai berikut :

No	Jumlah Satwa (ekor)	Lokasi	Korban	Luas Kerusak-an	Waktu kejadian	Informasi	Tindakan yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ds. Tasik Serai	Seorang penduduk penyadap getah	-	-	Riau Pos 20 Juni 1999	-
2	3	Ds. Bonai & Ds. Sontong Kec. Kunto Darussalam	2 (dua) orang meninggal	2 Ds	12 Oktober 2002 & 23 Okt 2002	SSWK Bengkalis	Upaya penangkapan tapi tidak berhasil
3	1	Bagan Siapi-api	1 (satu) orang meninggal	-	Agustus 2002	Kunjungan petugas di RSUD Pekanbaru	-
4	1	Pulau Santaulu Dumai	1 (satu) orang meninggal dan 1 orang luka-luka	-	10 Mei 2001	Riau Mandiri 12 Mei 2001	Upaya penangkapan namun tidak berhasil
5	1	Sungai Arut Kec. Bunut	1 (satu) orang meninggal	-	Juni 2002	SSWK Bengkalis	-
6	-	Ds. Sei Baung Kec. Rengat Barat	1 (satu) orang meninggal	-	-	Surat Kepala UTNBT No. 207/UTNBT/07 2001 Tgl 3 Juli 2001	-
7	1	Ds Bantaian Bagan Siapi-api Kab. Rohil	1 (satu) orang meninggal dan 1 orang luka-luka	-	Juni 2001	PT. Diamond Raya Timber Tgl 6 Sept. 2001	-
8	1	Ds. Parit Sicin Bagan Siapi-api Kab. Rohil	1 (satu) orang meninggal	-	Sept. 2001	Pt. Diamond Raya Timber Tgl 6 Sept. 2001	-

E. Penyebab gangguan Harimau Sumatera

Perkembangan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, menuntut adanya pembukaan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan lahan usaha. Lahan usaha tersebut dapat berupa areal pengusahaan hutan, Pemukiman maupun usaha tradisional yang berupa perladangan.

F. Upaya penanggulangan

Penanggulangan gangguan Harimau Sumatera selama ini yaitu dengan mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat secara aktif terutama pihak perusahaan dimana gangguan satwa tersebut terjadi.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan Harimau Sumatera di Propinsi Riau pada semua tempat yang terjadi gangguan dilakukan dengan penempatan perangkapnya, namun hanya pada tahun 1997 berhasil menangkap 3 (tiga) ekor Harimau Sumatera terdiri dari 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan didaerah Gelombang Minas Kecamatan Mandau, kemudian diserahkan kepada pihak Taman Safari Indonesia.

Selain itu dilakukan penyuluhan pada masyarakat dengan memberikan saran berupa :

- Membersihkan kebun-kebun tempat bekerja dari alang-alang agar lebih mudah melakukan pengawasan serta menghindari kerja pada dini hari dan sore hari.
- Agar jangan melakukan penembakan dan penjeratan terhadap Harimau karena binatang tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.
- Membuat upaya pemasangan perangkap seperti kerangkeng dan lubang jebakan.

III. UPAYA - UPAYA KEDEPAN

A. Pemintaan (Zonasi) Kawasan

Beranjak dari hasil inventarisasi di lapangan yang telah diolah dan dikumpulkan. dengan lengkap, maka langkah pertama yang mendesak untuk segera dilakukan adalah mengupayakan terwujudnya :

- Rehabilitasi Habitat Satwa
- Pelestarian Populasi Harimau Sumatera
- Pembinaan kawasan dan Populasi secara terpadu

Kejelasan program ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Habitat Satwa

Habitat Harimau Sumatera ini perlu dikukuhkan dalam blok-blok yang jelas dengan pemancangan patok pembatas dan pemasangan papan-papan larangan. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan agar status hukum atas blok Rehabilitasi Habitat Satwa dapat terjaga dengan optimal.

2. Pelestarian Populasi Harimau Sumatera

Pembuatan blok pelestarian populasi di halaman bebas (In-situ) bagi Harimau Sumatera ini, sampai saat ini masih merupakan upaya yang diprioritaskan, walaupun posisi dan kelamin satwa ini masih belum dapat dipastikan. Meski demikian upaya pelestarian In-situ masih mungkin dilaksanakan, mengingat upaya pelestarian secara Ek-situ masih memerlukan kerja keras antara lain dengan cara menangkap hidup-hidup satwa ini dari habitat aslinya untuk dikembangkan di Habitat yang bersifat artifisial.

3. Pembinaan Kawasan dan Populasi secara Terpadu

Upaya pembuatan blok pembinaan kawasan dan populasi Harimau Sumatera ini tampaknya tidak hanya di bebaskan pada instansi BKSDA Riau saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan lembaga-lembaga lain misalnya Pemerintah Daerah dan NGO atau LSM baik yang bersifat lokal, regional maupun yang bertaraf internasional. Kontribusi masing-masing lembaga/instansi diharapkan dapat difokuskan pada profesionalitas lembaga / instansi tersebut dan dipadukan pada program yang bersifat terpadu dan telah disepakati bersama. Pembinaan kawasan dan populasi dengan teknik " *one institution show* " tampaknya sudah tidak lazim dan tidak populer lagi di mata masyarakat sekarang ini.

B. Sosialisasi Program Pelestarian.

Sosialisasi/kampanye program pelestarian satwa (khususnya Harimau Sumatera ini) gaungnya belum bersifat mendunia, sehingga upaya-upaya pelestariannya belum dapat menyentuh sisi-sisi " *Decesion Maker* " Negara ini bila dibandingkan dengan upaya pelestarian kayu/hutan.

Sosialisasi program ini memang memerlukan kerja keras dan pembiayaan yang tinggi. Namun langkah ini harus terus diupayakan agar " *Political Will* " dari Pemerintah dapat diwujudkan. Pendekatan politik sangat diperlukan juga, agar masyarakat bawah mengerti akan pentingnya mengupayakan pelestarian Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*) ini.

UPAYA PENYELAMATAN
BADAK SUMATERA
(*Dicerorhinus sumatrensis*)
DI PROPINSI RIAU

DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU

PEKANBARU, JULI 2002

KATA PENGANTAR

Dengan berkembangnya pembangunan di Propinsi Riau utamanya pembangunan perkebunan, eksploitasi kayu oleh HPH, HPHN dan transmigrasi mengakibatkan habitat badak menjadi semakin sempit dan terpecah-pecah, disamping itu persediaan pakan serta ruang gerak yang terbatas mengakibatkan gajah masuk ke areal perkebunan dan sekitarnya.

Untuk kepentingan penyelamatan, perlu dikembangkan suatu konsep untuk jangka panjang guna menyelesaikan permasalahan konflik kepentingan antara kebutuhan manusia akan lahan dan kelestarian badak sehingga populasi alamiah pada jumlah tertentu perlu dipertahankan.

Semoga tulisan ini cukup memberikan gambaran yang lebih konkrit terhadap kenyataan dan upaya Pemerintah di dalam mensekresikan gerak pembangunan Nasional di segala bidang.

KEPALA DINAS KEHUTANAN

Ir. FAUZI SALEH

NIP. 420004408

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Dasar Hukum.....	1
BAB II. KONDISI BADAK SUMATERA	2
1. Keberadaan Badak Sumatera	2
2. Perilaku Badak Sumatera	2
3. Kondisi Habitat.....	2
BAB III. PENYELALIAN BADAK SUMATERA DI PROPINSI RIAU	4
BAB IV. USAHA PENYELAMATAN SELANJUTNYA	6
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	8

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang.

Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) merupakan satwa langka yang dilindungi Undang-Undang sejak tahun 1931 dan saat ini dikuatkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan - peraturan lainnya.

Penyebaran badak di Sumatera menurut literatur yang ada pada awalnya hampir merata, mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Namun dengan perkembangan yang ada mengakibatkan penyempitan serta terpotong-potongnya habitat yang ada menyebabkan populasi badak di Sumatera turun drastis.

Di Propinsi Riau pada tahun 1950 penyebaran badak masih sampai di daerah Okura sampai ke perbatasan Sumatera Utara.

Dari survey yang dilakukan Van Stean pada tahun 1995 di Propinsi Riau ditemukan indikasi beberapa daerah terdapat populasi badak yang tidak banyak dan tersebar di daerah Bagan Sinembah, Bagan Batu sampai daerah Mahato dan Dalu-Dalu dan informasi populasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan badak tersebut tidak pada kawasan konservasi sehingga harus diupayakan penetapan kawasan sebagai habitat badak atau memindahkan badak-badak yang ada ke kawasan yang lebih layak.

Karena kawasan yang terdapat badak merupakan kawasan hutan produksi dan sebagian merupakan hutan konversi yang akan di *land clearing* maka diputuskan pada waktu itu bahwa sebagian badak yang ada diselamatkan untuk dilakukan *breeding* di Indonesia, Inggris dan Amerika.

2. Maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan dan tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi Badak Sumatera yang ada di Propinsi Riau, agar dapat dilakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap sisa populasi yang ada.

3. Dasar Bukum.

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Peraturan Pemerintah No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis FloraFauna
4. Peraturan Pemerintah No.7/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Flora Fauna
5. Keputusan Presiden No.34/1-978 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

- Keputusan Presiden No. 1/1 987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973.

BAB II KONDISI BADAK SUMATERA

1. Keberadaan Badak Sumatera dan kondisi habitatnya,

Di Indonesia saat ini hidup 2 jenis badak dari 5 jenis badak yang ada di dunia masing-masing adalah Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dan Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*).

Badak Sumatera atau badak bercula 2 merupakan badak terkecil diantara 5 jenis badak yang ada. Disebut juga sebagai *The hairy rhino* karena tubuhnya yang ditumbuhi bulu/rambut pendek dan lebat terutama pada telinganya yang selalu dikepak-kepak.

Badak dilindungi pada awalnya berdasarkan Ordonansi Perlindungan Satwa Liar tahun 1931 dan selanjutnya diperkuat dengan UU No. 5 tahun 1990.

Habitat alamnya hampir diseluruh Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung, pada hutan dataran rendah sampai hutan primer pegunungan pada ketinggian kira-kira 1.900 dpl. Tetapi pada saat ini habitat aslinya sudah terpotong-potong, merupakan kantong kantong yang saling terpisah.

Perkiraan populasi badak di seluruh Sumatera menurut Van Streean 1985, antara 400-500 ekor masing-masing tersebar pada TN Kerinci Sebelat antara 100-200 ekor, TN Gunung Leuser antara 75- 100 ekor, di TN Bukit Barisan Selatan 25 -60 ekor dan ditempat-tempat lain seperti di Propinsi Riau di Torgamba, Kersik Putih Mahato, Dalu-Dalu dan lain-lain. Populasi Badak Sumatera terus menurun drastis karena masih terus berlangsungnya perburuan liar untuk mendapatkan cula dan bagian-bagian tubuh lainnya.

2. Perilaku Badak Sumatera.

Badak Sumatera jenis pemakan tumbuhan dan memerlukan tidak kurang 10% dari berat badannya, dan sangat sensitif akan kehadiran aktifitas manusia sehingga apabila terdapat kegiatan yang mengusiknya ia akan lebih menjauh lagi ke hutan yang lebih lebat.

Badak Sumatera menghabiskan waktunya untuk mencari makan dan berkubang pada wilayah jelajahnya dan selalu terpisah satu dengan lainnya. Mereka akan bertemu pada saat musim kawin. Badak melahirkan 1 ekor sekali lahir. Sehingga bila terjadi gangguan terhadap kegiatan normalnya akan mengakibatkan perubahan hasil reproduksi badak tersebut.

3. Kondisi Habitat.

Kerusakan habitat sebagai akibat eksploitasi hutan dan konversi hutan untuk perkebunan/pertanian, dan lain-lain merupakan faktor penting pula menurunnya populasi Badak Sumatera, dimana badak-badak tercecer dalam kantong-kantong hutan yang terpisah.

Beberapa Taman Nasional di Sumatera seperti TN Gunung Leuser, TN Kerinci Sebelat, TN Bukit Barisan Selatan merupakan tempat yang relatif aman bagi kehidupan dan perlindungan Badak Sumatera.

Di beberapa areal hutan sebagai hutan produksi (areal konsesi HPH) masih ditemukannya badak yang terkurung dalam kantong-kantong hutan tersebut seperti di Torgamba, Kersik Putih Mahato, semuanya di Propinsi Riau dan kawasan hutan di luar Propinsi Riau.

Banyaknya individu yang tercecer itu masih belum diketahui dengan pasti, karena belum adanya survey yang detail untuk mengetahui jumlah badak tersebut. Badak-badak tersebut merupakan badak-badak yang sudah sangat terancam kehidupannya, dan harus segera diselamatkan, diantaranya dengan translokasi ke dalam kawasan konservasi atau ke dalam sarana pusat penangkaran (*breeding centre*).

BAB III PENYELAMATAN BADAK SUMATERA DI PROPINSI RIAU

PENYELAMATAN BADAK SUMATERA.

Untuk penyelamatan Badak Sumatera yang sudah sangat terancam itu telah diadakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan) dengan pihak asing.

Yang pertama kerjasama Ditjen PHPA dengan Yayasan Kebun Binatang Inggris (The Homlett and Port Lympne Foundation) dan yang kedua dengan kebun binatang Amerika Serikat (The American Association of Zoological Park and Aquarium).

Langkah yang diambil adalah menangkap badak yang terancam dan ditranslokasi ke sarana penangkaran baik di Indonesia, Inggris maupun Amerika.

Kerjasama dengan HPLF Inggris mulai dilaksanakan Agustus 1985 di pusatkan di Tanjung Medan - Bagan Batu, Riau. Daerah operasi meliputi Kubu/Boltrem area, Sungai Daun area dan Kersik Putih area. Dari kerjasama ini berhasil diselamatkan 5 ekor badak, 3 jantan, 2 betina dan 1 mati.

Di Kubu/Boltrem berhasil diselamatkan 1 ekor badak jantan, dan di Sungai Daun 1 ekor badak betina. Setelah kerjasama dengan HPLF berakhir pada bulan April 1988, kerjasama dilanjutkan dengan AZZPA Amerika. Lokasi kegiatan adalah Kersik Putih Mahato area meliputi HPH Goodwin Timber, Shoreamer Timber, PT. SSPI, Barakas Timber dan Rokan Timber, dan Dalu-Dalu dalam areal konsesi Murini Timber. Juga dilakukan survey di lokasi lain yang diduga badak ada dalam kondisi habitat dan kehidupan yang sangat terancam. Dan saat ini kerja sama ini masih berlangsung. Kerjasama dengan AZZPA telah berhasil diselamatkan 4 ekor badak, semuanya kelamin betina, satu diantaranya ditranslokasikan ke Taman Safari Indonesia.

Selama ini kegiatan penyelamatan badak di Propinsi Riau, kegiatannya di pusatkan di Tanjung Medan/Torgamba Kersik Putih/Mahato, Dalu - Dalu/Rokan .

1. Tanjung Medan/Torgamba, Daerah operasional meliputi Boltrim/Kubu area, Sungai Daun, Kersik Putih dan Tanjung Medan sendiri. Di Tanjung Medan berhasil diselamatkan lima ekor badak, di Kubu / Boltrim dan sungai Daun masing - masing satu ekor. Di Tanjung Medan dipastikan sudah tidak ada lagi badak, karena hutan sudah dikonversi menjadi perkebunan sawit,
2. Kersik Putih/Mahato area Di Kersik Putih telah berhasil diselamatkan dua ekor, semuanya betina. Diperkirakan masih ada dua ekor lagi yang belum diselamatkan.
3. Dalu - Dalu/Rokan Disini diselamatkan pula dua ekor badak yang semuanya berkelamin betina. Diperkirakan masih ada satu ekor badak yang belum berhasil diselamatkan.
4. Disamping itu dilaksanakan pula survey di lokasi lainnya di propinsi Riau seperti : Pasir Pangarayan, Rimbo Melintang Kec. Bangko, Kota Karo, Duri, Lipat Kain, Siberida dan lain-lain. Semuanya belum menunjukkan hasil yang positif atas keberadaan badak, Namun demikian survey di lokasi lain yang diperkirakan masih ada badaknya belum dan perlu dilaksanakan.

BAB IV. USAHA PENYELAMATAN SELANJUTNYA

Badak yang sangat terancam adalah badak yang tidak mampu melanjutkan keturunan jenisnya dalam situasi lingkungan pada saat ini karena :

1. Secara genetis (*sex ratio* dan komposisi umur yang tidak proporsional) satwa anggota populasi tidak dapat memperbanyak jenisnya.
2. Satwa tidak terjamin dari kerusakan habitat dan ancaman perburuan liar.

Seekor badak atau sekelompok kecil yang terpisah/terisolasi tidak ada jaminan terhadap kerusakan habitat dan perburuan liar dikatakan sebagai badak yang sangat terancam.

Usaha penyelamatan terhadap badak yang sangat terancam adalah :

1. Translokasi, dapat ke kawasan suaka alam/habitat alam yang lebih aman atau ke sarana penangkaran.
2. Merubah status kawasan hutan (habitat badak) menjadi kawasan konservasi atau menjadi pusat pengembangbiakan satwa liar (*breeding center*).

Kawasan yang masih memungkinkan untuk dijadikan perlindungan satwa mamalia khususnya (Badak, Harimau, Tapir, Beruang, dll) adalah kawasan Kersik Putih meliputi Sebagian PT Shoreamer Timber dengan status hutan produksi terbatas dan hutan lindung Mahato yang terletak di Propinsi Riau.

Sebagian kawasan yang berada di Sumatera Utara yaitu PT Godwin Timber dan sebagian dari PT Barakaz Timber yang berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan kawasan tersebut merupakan hutan produksi terbatas. Kedua kawasan tersebut telah diusulkan menjadi kawasan suaka alam dengan fungsi Suaka Margasatwa.

Dalam hal badak kalau dapat diselamatkan, maka selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Areal Tanjung Medan dan sekitarnya. Keberadaan Badak di areal ini sangat disangsikan, karena lokasi telah menjadi areal perkebunan kelapa sawit, namun perlu di survey ulang di kawasan sekitarnya.
2. Areal Sungai Daun/Sungai Meranti Sebagian besar lokasi ini diperuntukkan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena itu survey ulang perlu dilaksanakan untuk melacak kembali satu ekor badak yang belum terselamatkan. Adapun daerah ini meliputi daerah Sungai Meranti, HPH PT Sinar Sumatra Plywood Industri / PT Mujur Timber.
3. Areal Boltrem/Kubu sangat pesat perluasan areal perkebunan dan kegiatan logging sehingga badak yang diperkirakan ada makin terjepit ke arah hutan rawa di sebelah baratnya yaitu di daerah Kubu I, II, III dan kawasan yang masuk ke Sumatera Utara, yaitu sepanjang Sungai Barumun termasuk HPH PT. Pamujur dan PT. Rimba Baru.
4. Di areal Kersik Putih/Mahato telah diselamatkan 2 ekor badak yang semuanya berkelamin betina, diperkirakan masih 2 ekor badak lagi yang tersisa. Gangguan- gangguan di areal ini berupa pengrusakan habitat berupa kegiatan eksploitasi hasil hutan dan perburuan liar. Survey ulang yang lebih mendetail perlu untuk melacak kembali paling tidak 2 ekor badak yang belum tertangkap. Sebagian besar areal kerja Kersik Putih - Mahato merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan berbatasan dengan Hutan Lindung Mahato. Disamping itu areal inipun potensial dan masih

memiliki banyak satwa liar yang dilindungi seperti: gajah, harimau, beruang, tapir, rusa, berbagai jenis burung seperti : kuau, enggang dan lain-lain.

Karena itu areal Kersik Putih dan Mahato dapat dipertimbangkan sebagai kawasan konservasi dengan fungsi sebagai Suaka Margasatwa.

5. Areal Dalu-Dalu Rokan.

Berada dalam areal hutan produksi tetap dan hutan konversi dimana sampai Tim Expedisi penyelamatan Badak Sumatera meninggalkan daerah ini diperkirakan masih ada 1 ekor badak lagi. Terganggunya penyelamatan badak di areal ini karena berlangsungnya penebangan dalam rangka *land clearing* dan penebangan liar sementara beberapa perangkat masih dioperasikan. Survey ulang juga perlu dilakukan untuk melacak kembali keberadaan badak yang belum berhasil diselamatkan. Areal tersebut meliputi Sungai Air Hitam HPH PT, Rokan Timber dan PT. Murini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Badak Sumatera sebagai salah satu mamalia langka di dunia, kelangsungan hidupnya makin terancam karena proses pengrusakan habitat dan kegiatan pembalakan liar.
2. Badak yang kelangsungan hidupnya terancam dapat diselamatkan dengan cara translokasi atau melindungi habitatnya dari pengrusakan hutan dan perburuan liar.
3. Di Propinsi Riau telah berhasil diselamatkan 11 ekor badak, masing-masing
 - 5 ekor di Tajung Medan,
 - 1 ekor di Kubu Boltrem,
 - 1 ekor di Sungai Daun,
 - 2 ekor di Kersik Putih Mahato,
 - 2 ekor di Dalu-Dalu.

Diperkirakan masih ada paling tidak 5 ekor badak lagi masing-masing di areal Kubu Boltrem 1 ekor, di areal Sungai Daun 1 ekor, di areal Kersik Putih Mahato 2 ekor dan di areal Dalu-Dalu Rokan 1 ekor.

4. Perlu di survey ulang dan dimonitor ketat terhadap areal Boltrem, Sungai Daun, Kersik Putih dan Dalu-Dalu Rokan untuk mengetahui keberadaan badak yang belum berhasil diselamatkan dan usaha penyelamatan, selanjutnya.
5. Survey di areal lain di Propinsi Riau belum menemukan hasil yang positif, namun demikian survey ditempat lain yang diperkirakan ada badaknya perlu dilaksanakan (Propinsi Sumatera Utara).
6. Areal Kersik Putih - Hutan Lindung Mahato dan sebagian HPH PT. Goodwin Timber potensial untuk tempat hidup satwa liar mamalia besar. Karena itu diusulkan/dipertimbangkan menjadi kawasan konservasi (suaka margasatwa), minimal kawasan hutan tetap.

7. Untuk kegiatan penyelamatan selanjutnya kiranya pada HPH-HPH yang diperkirakan masih ada badaknya untuk tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi sampai upaya penyelamatan badak selesai.

**UPAYA PELESTARIAN GAJAH
DI PROPINSI RIAU**

DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU

PEKANBARU, JULI 2002

KATA PENGANTAR

Dengan berkembangnya pembangunan di Propinsi Riau utamanya pembangunan perkebunan, eksploitasi kayu oleh HPH, HPHT dan transmigrasi mengakibatkan habitat gajah menjadi semakin sempit dan terpecah-pecah, disamping itu persediaan pakan serta ruang gerak yang terbatas mengakibatkan gajah masuk ke areal perkebunan dan sekitarnya.

Untuk kepentingan penanggulangan gangguan, perlu dikembangkan suatu konsep untuk jangka panjang guna menyelesaikan permasalahan konflik kepentingan antara kebutuhan manusia akan lahan dan kelestarian gajah sehingga populasi alamiah pada jumlah tertentu perlu dipertahankan.

Semoga tulisan ini cukup memberikan gambaran yang lebih konkrit terhadap kenyataan dan upaya Pemerintah di dalam mensekresikan gerak pembangunan Nasional di segala bidang.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
Propinsi Riau**

**Ir. FAUZI SALEH
NIP.420004408**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Dasar Hukum	2
BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN	3
1. Keberadaan Gajah Sumatera	3
2. Perilaku Gajah	4
3. Penyebab Timbulnya Gangguan	4
4. Permasalahan Gangguan Gajah	5
5. Kondisi Habitat	6
6. Potensi Pendukung yang ada	6
BAB III. UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN	8
1. Pemandahan (Translokasi) Gajah liar	8
2. Pusat Latihan Gajah	8
3. Pembuatan Zona Penyangga dan Pembatas	10
BAB IV. PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN GAJAH	12
1. Jangka Pendek	12
2. Jangka Menengah	11
3. Jangka Panjang	14
BAB V. PENUTUP	15
1. Kesimpulan	15
2. Saran	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Penyebaran Gajah dan Lokasi Gangguan Gajah.
- Lampiran 2. Peta Penyebaran Gajah di Propinsi Riau.
- Lampiran 3. Gambar Kegiatan Pelatihan Gajah di Pusat Latihan Gajah Sebangka Riau.
- Lampiran 4. Gambar Kegiatan Pemanfaatan Gajah untuk Pariwisata di Pusat Latihan Gajah.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan satwa langka yang dilindungi Undang-Undang sejak tahun 1931 dan dikuatkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Satwa ini juga merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pada saat ini maupun dimasa yang akan datang, sesuai dengan azas pokok kegiatan konservasi yang terdiri dari upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang lestari.

Dewasa ini gajah merupakan satwa yang unik kedudukannya dalam era pembangunan yang semakin pesat. Disatu pihak gajah dilindungi keberadaannya oleh Undang-Undang dan dijaga kelestariannya, tetapi dipihak lain gajah dapat menimbulkan kerugian besar pada tanaman komersial seperti ; kelapa sawit dan karet, apabila tidak dikelola dengan baik. Timbulnya serangan gajah ini disebabkan ruang gerak mereka semakin sempit akibat hutan yang semula merupakan habitat dan daerah jelajah (*home range*) mereka dialihfungsikan untuk berbagai kepentingan, seperti pembukaan areal perkebunan skala besar, transmigrasi, Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, dan kepentingan lainnya yang dilakukan tanpa memperhitungkan keradaan gajah tersebut sebelumnya.

Propinsi Riau dengan luas daratan 9.456.160 Ha telah berkembang dengan cepat pembangunan yang memerlukan ruang (hutan) sehingga kondisi hutan yang ada sebagai habitat gajah semakin sempit. Dari luas tersebut di atas kawasan konservasi di Propinsi Riau seluas 514.880 Ha (5,44 %). Dan dari luas ini tidak semua dapat dimanfaatkan sebagai habitat satwa liar khususnya gajah karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan. Upaya penyelesaian masalah gangguan gajah seperti tersebut diatas, tidak dapat dilakukan dengan cara membunuh atau memusnahkannya seperti yang dilakukan terhadap organisme pengganggu lainnya, karena gajah merupakan satwa yang dilindungi. Oleh sebab itu perlu dicarikan jalan keluar agar gajah dapat bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1978, yaitu dengan melaksanakan pola penanggulangan gangguan satwa gajah melalui 3 (tiga) tahapan , Tata Liman, Bina Liman, dan Guna Liman, Dari berbagai pengalaman di lapangan sampai saat ini, timbul gagasan kearah upaya penanggulangan gangguan dan konservasi gajah yang lebih mantap dan terarah, dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa gajah bukan merupakan hama, tetapi merupakan sahabat bagi manusia dan dapat bermanfaat jika dikelola sesuai dengan kaedah konservasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya penanggulangan gangguan dan konservasi gajah agar dapat diupayakan sebagai mitra pembangunan kehutanan dan perkebunan.

3. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Pemerintah No.7/ 1999 tentang Pengawetan Jenis Flora dan Fauna,
4. Peraturan Pemerintah No.8/1 999 tentang Pemanfaatan Jenis Flora dan Fauna.
5. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
6. Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973.

BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

1. Keberadaan Gajah Sumatera

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan spesies dari Gajah Asia (*Elephas maximus*), mempunyai penyebaran cukup luas di pulau Sumatera mulai dari Propinsi Aceh hingga Propinsi Lampung. Hidupnya berkelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5-20 ekor. Kelompok-kelompok gajah tersebut dalam memenuhi kebutuhan makanannya selalu berpindah, dari satu tempat ke tempat lain mengikuti pola jelajah/pengembaraan dengan jalur yang relatif tetap. Jalur jelajah/pengembaraan tersebut dapat melewati areal berupa hutan maupun wilayah yang telah diusahakan manusia.

Gajah Sumatera merupakan jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah serta termasuk dalam daftar Appendix I CITES. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh WWF tahun 1985, diketahui jumlah gajah di Propinsi Riau berkisar 1.100 -1.700 ekor yang tersebar pada 11 lokasi sebelum adanya pembukaan areal hutan secara besar-besaran menjadi areal perkebunan, HTI dan transmigrasi. Namun pada saat ini kondisinya sudah jauh berbeda, dimana daerah penyebaran gajah semakin terpecah dan merata dengan jumlah populasi yang semakin menurun dimana berdasarkan data Unit KSDA Riau tahun 1999, jumlah populasi gajah di Propinsi Riau berkisar antara 700 - 800 ekor yang tersebar di 18 kantong.

Dari 18 kantong populasi gajah yang ada di Riau 6 kelompok populasi sudah masuk dalam tahap *emergency* karena habitatnya tidak mencukupi dan selalu mengganggu masyarakat dengan jumlah gajah \pm 273 ekor.

Pada tabel 1. ini digambarkan hubungan antara umur, tinggi dan berat gajah.

No.	Usia gajah (Tahun)	Tinggi gajah (Cm)	Barat badan (Kg)	Keterangan
1	3-5	65-93	450-650	Antara jantan dan betina
2	6-9	95-127	650-1.250	Tidak jauh berbeda
3	10-15	130-175	1.250-1.750	
4	16-20	180-240	1.800-2.250	
5	20 ke atas	250-300	2.250-2.950	

Sumber : Dirjen PHPA dan LP IPB (1987)

Untuk memulihkan suatu populasi gajah seperti kondisi semula, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena jangka waktu hamil kira-kira 20 bulan, Diperkirakan jarak kelahiran anak gajah dari periode pertama melahirkan hingga periode kedua melahirkan memakan waktu lebih kurang 4 tahun. Sedangkan masa dewasa kelamin pada Gajah Sumatra berkisar antara 10 sampai 12 tahun.

Menurut UNDP/FAO (1979) kemungkinan perkembangan suatu populasi gajah dari sekelompok gajah yang berjumlah 30 ekor membutuhkan waktu selama 30-50 tahun, perkiraan ini berakut bila habitat gajah tidak terganggu dan apabila habitatnya rusak populasinya akan lebih sedikit,

2. Perilaku Gajah

Di dalam habitat alam, seekor gajah dewasa membutuhkan daerah sekitar 400 Ha untuk hutan sekunder dan 600 Ha pada hutan primer untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan daerah jelajah yang tetap. Aktivitas gajah dalam hal mencari makan cukup tinggi, yaitu antara 16-18 jam per hari dengan kebutuhan makan 10-15% dari berat badannya .

Gajah memiliki sifat hati-hati, pendendam, cerdas serta cepat mendeteksi dan beradaptasi dalam mengatasi adanya perangkap-perangkap yang dipasang, misalnya mereka dapat membedakan antara bunyi desing peluru asli dengan bunyi mercon bambu, juga mereka dapat mencari jalan/pintu lain untuk masuk sekiranya dilokasi tertentu dihalangi obor/api atau partit isolasi, serta pagar beraliran listrik (*electrical fences*).

Untuk mendapatkan air, gajah membuat lubang sedalam 50-100Cm dengan kaki dan belainya. Menurut Alfevugt and Kuit (1975) gajah dapat mendeteksi air sampai sejauh \pm 5 Km. Secara berkala gajah jantan mengalami gangguan "Kegilaan" yang disebut "MUST" pada masa ini gajah mempunyai tempramen yang berbeda dari biasanya. Satwa tersebut menjadi pemarah

dan pemurung serta cenderung menghancurkan apa yang dijumpainya dan sering mengganggu gajah lain yang diakhiri dengan perkelahian, bahkan manusia sering kali menjadi sasaran kemarahannya. Gejala 'must' tersebut ditandai dengan sekresi berminyak yang keluar dari ketenjar yang terletak ditengah-tengah antara saluran telinga dan mata. Cairan ini terlihat pada dahi gajah yang agak berkilat dan mengeluarkan bau yang khas. Menurut Evans, gajah pekerja di Asia tidak digunakan pada saat mengalami "must" yang memakan waktu 1-3 minggu dan masa tersebut terjadi terutama pada saat birahi.

4. Penyebab Timbulnya Gangguan Gajah

Perkembangan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, disisi lain menuntut adanya pembukaan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan lahan usaha. Lahan usaha tersebut dapat berupa areal Pengusahaan Hutan, Pemukiman maupun usaha tradisional yang berupa perladangan.

Dengan adanya pembukaan lahan hutan yang merupakan habitat gajah untuk kepentingan lain, seperti pembangunan perkebunan, pengusahaan hutan produksi dan pengembangan transmigrasi serta adanya jalur-jalur pipa minyak dengan diameter 60 cm keatas dengan tinggi antara 1 - 2 M, telah mengakibatkan populasi gajah yang berada di daerah hutan yang semula merupakan habitatnya menjadi terpisah-pisah untuk menempati /mencari habitat yang tersisa. Habitat-habitat yang tersisa biasanya berupa hutan dengan luasan yang relatif kecil dan kondisi pakan yang tidak mendukung, atau sering disebut "kantong habitat". Pada umumnya gajah memerlukan makanan dalam jumlah yang besar untuk mempertahankan hidupnya, tetapi karena persediaan makanan pada kantong habitat biasanya sangat terbatas, maka populasi gajah yang kebetulan berada di dalam kantong habitat tersebut berusaha masuk ke areal perkebunan, pertanian serta pemukiman yang ada disekitar kantong habitat tersebut, sehingga menimbulkan kerusakan serta kerugian yang tidak sedikit.

4. Permasalahan Gangguan Gajah

Dengan perkembangan pembangunan di Propinsi Riau, terutama pembangunan perkebunan dan transmigrasi, memungkinkan timbulnya masalah gangguan gajah di daerah-daerah yang tersebar di Propinsi Riau, mengingat proses '*Land clearing*' dalam pembukaan areal hutan semakin mempersempit habitat gajah dan membuat populasi gajah terpisah-pisah. Disamping itu dengan adanya pembangunan jaringan pipa minyak yang berdiameter diatas 60 cm dengan tinggi 1 - 2 meter mengakibatkan terbatasnya ruang gerak gajah dalam mencari makan.

Terputusnya daerah jelajah dan semakin sempitnya ruang gerak gajah mengakibatkan berkurangnya persediaan pakan gajah di hutan, sehingga

mendorong gajah-gajah tersebut memasuki areal perkebunan, pertanian dan transmigrasi. Gajah akan senantiasa kembali bila makanan yang dirasakan itu mudah dan nikmat, mereka memperoleh sumber makanan baru yang tersedia di kebun-kebun yang terdapat di sekitar kantong habitatnya, terutama kelapa sawit.

Gajah-gajah tersebut dengan mudah membongkar kelapa sawit yang berumur 2 tahun untuk dimakan umbutnya. Walaupun umbut kelapa sawit bukan merupakan makanan utama gajah, tetapi tampaknya gajah sangat menyenangi jenis tumbuhan ini. Dengan demikian kawanan gajah cenderung akan tertarik untuk kembali memakan umbut kelapa sawit yang terlewat sepanjang jalur jelajahnya. Serangan tersebut akan berkurang secara otomatis apabila umur kelapa sawit sudah lebih dari 2 tahun, karena gajah tersebut mengalami kesulitan untuk membongkar mahkota pohon kelapa sawit yang telah banyak durinya.

Disamping menyerang tanaman kelapa sawit, gajah juga merusak tanaman karet sampai umur 4 tahun, dengan memakan daun dan mematahkan batangnya. Dengan asumsi bahwa gajah hanya makan umbut kelapa sawit saja, maka kerugian yang ditimbulkan oleh gajah dapat dinilai sebagai berikut:

- Dari perkiraan berat umbut per batang kelapa sawit umur 2 tahun rata-rata 1- 2 Kg,
- Apabila rata-rata gajah yang memakan umbut tersebut seberat 1 ton (1.000 Kg), maka setiap hari diperlukan bahan makanan seberat 100 sampai 150 Kg, yaitu 10-15% dari berat badannya.
- Dikaitkan dengan pohon kelapa sawit umur 2 tahun maka setiap gajah apabila hanya memakan umbut kelapa sawit akan menghabiskan 1 ha pohon kelapa sawit.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kelapa sawit bukan satu-satunya makanan gajah melainkan sebagai makanan pelengkap saja, mengingat makanan utama gajah di alam bebas adalah berupa tanaman bambu, gelagah, rumput-rumputan, pisang hutan, buah-buahan hutan, seperti mangga hutan, kedondong hutan, tebu dan lain sebagainya.

Data yang tercatat pada Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Riau dan perkiraan tingkat kerusakan kebun pada daerah-daerah. gangguan gajah yang dialami perkebunan terhitung secara kumulatif sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1999 diperkirakan mencapai:

- Kebun Kelapa sawit kerugian mencapai 30 %
- Kebun Karet kerugian mencapai 10 - 20 %
- HTI Akasia dan sengon kerugian mencapai 5-10%

5. Kondisi Habitat

Dengan pesatnya pembangunan di Propinsi Riau konsekuensinya adalah pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan, HPHTI, Transmigrasi

dan pertambahan yang kesemuanya ini memerlukan lahan hutan yang pada dasarnya sebagai habitat satwa liar begitu juga gajah.

Dari luas daratan Propinsi Riau 9.456.160 Ha telah diperuntukan sebagai kawasan pengembangan non kehutanan seluas 4.894.850 Ha (47,97%), sedang untuk pengembangan kawasan kehutanan seluas 4.591.309 Ha (52,03%), dimana 14.880 Ha (5,44%) adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi di Propinsi Riau terdapat beberapa kawasan yang diperuntukan sebagai suaka margasatwa mamalia besar seperti :

1. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil 50.000 Ha,
2. SM. Balai Raja 18.000 Ha,
3. SM. Bukit Rimbang Bukit Baling 136.000 Ha,
4. SM. Kerumutan 120.000 Ha.

Namun dari kawasan-kawasan ini tidak semua hamparan dapat dimanfaatkan sebagai habitat satwa liar khususnya gajah karena disamping faktor topografi juga faktor keamanan kawasan. Karena kawasan konservasi yang tidak mendukung sebagai habitat akhir gajah maka sering gajah-gajah tersebut keluar, dari habitatnya mengganggu tanaman perkebunan dan masyarakat sekitarnya.

Dengan semakin sempitnya habitat maka gajah yang mempunyai daerah teritorial dan kelompok terpecah-pecah pada kantong-kantong habitat dan kawasan gajah yang menyebar. Hal ini semakin hari penyebaran gangguan gajah semakin luas dan merata sehingga gangguan gajah di Propinsi Riau tersebar mulai daerah perbatasan Sumatera Utara sampai ke perbatasan Jambi.

6. Potensi Pendukung yang ada

Dalam rangka upaya konservasi gajah dan penanggulangan gangguan gajah, diperlukan faktor-faktor pendukung disamping potensi kawasan yang ada. Potensi pendukung yang ada adalah :

a. Sumber daya manusia

- Tenaga Penembak bius 4 (empat) orang,
- Tenaga Penangkap gajah 20 (dua puluh) orang,
- Tenaga Pawang Gajah 41 (empat puluh satu) orang

b. Sumber daya gajah

- Gajah tangkap 4 (empat) ekor,
- Gajah latih 6 (enam) ekor,
- Gajah patroli/pengaman 17 (tujuh belas) ekor,
- Gajah atraksi 38 (tiga puluh delapan) ekor.

c. Sarana dan Prasarana.

- Senjata bius 4 (empat) pucuk laras panjang,
- Senjata bius 1 (satu) pucuk laras pendek,
- Mobil Truk Nissan Diesel 1 (satu) unit,
- Mobil Pick Up 1 (satu) Unit. (keadaan rusak berat).

d. Daya tampung Pusat Latihan Gajah.

- Kemampuan melatih 100 (seratus) ekor,
- Jumlah gajah yang ada di PLG 65 (enam puluh lima) ekor,
- Sisa kapasitas 35 (tiga puluh lima) ekor.

BAB III. UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Pemindahan (Translokasi) Gajah Liar

Dalam rangka penanggulangan gangguan dan pelestarian satwa gajah harus disiapkan calon lokasi habitat pengungsian sebagai tempat berkembangbiak, tempat mencari makan, tempat berlindung dan bermain bagi gajah dengan mempertimbangkan faktor luas, keadaan pakan, topografi dan sebagainya.

Beberapa kegiatan pemindahan yang dilakukan oleh KSDA Riau adalah :

1. Tahun 1992-1996 sebanyak 35 ekor dipindahkan dari Proyek PLTA Kota Panjang ke SM Giam Siak Kecil.
2. Tahun 2000 sebanyak 18 ekor dipindahkan dari daerah Keritang ke TN Bukit Tigapuluh 6 ekor, SM. Rimbang Baling 7 ekor dan ke PLG 5 ekor.
3. Tahun 2001 sebanyak 20 ekor dipindahkan dari beberapa daerah gangguan ke SM Bukir Rimbang Bukit Baling,
4. Tahun 2002 sebanyak 16 ekor gajah dipindahkan dari daerah Minas, Kandis dan Petapahan ke SM. Giam Siak Kecil,

2. Pusat Latihan Gajah (PLG)

Salah satu sarana penunjang dalam rangka penanggulangan gangguan gajah adalah Pusat Latihan Gajah (PLG). PLG merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan kesengetahuan kepada masyarakat bahwa gajah tidak semata-mata merupakan satwa pengganggu/perusak tetapi kalau dilatih ternyata dapat menjadi satwa yang bermanfaat. Sasaran dari Pusat Latihan Gajah ini adalah untuk melatih gajah menjadi gajah tangkap/latih, melatih gajah liar menjadi satwa tari, satwa tunggang ataupun satwa atraksi serta untuk mendidik tenaga pawang gajah.

Di dalam Pusat Latihan Gajah (PLG) ini terdapat urutan-urutan kegiatan sebagai berikut :

a. *Penangkapan*

Penangkapan diutamakan pada gajah/kelompok gajah yang terisolir serta gajah/kelompok gajah yang berasal dari kantong-kantong habitat yang melebihi daya dukungnya, Pelaksanaan penangkapan gajah dilakukan dengan cara membius dan mengangkutnya. Gajah yang muda diangkut ke PLG untuk dilatih, sedangkan gajah dewasa/tua diangkut ke lokasi habitat pengungsian (Game refugee).

Penangkapan bertujuan untuk mencari gajah yang akan dilatih di PLG, mengurangi populasi gajah yang melebihi daya dukung pada suatu habitat, dan sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan gangguan gajah, serta untuk menjadikan gajah sebagai salah satu objek wisata yang menarik.

Penangkapan gajah liar diprioritaskan pada lokasi dimana gajah terisolir dan disekitar hutan yang berbatasan dengan daerah gangguan, atau populasi gajah yang terancam kehidupannya karena habitatnya sempit dan terisolir oleh perkebunan/transmigrasi/pemukiman penduduk serta kondisi pakan yang tidak memadai.

b. *Pengangkutan*

Untuk mengangkut gajah yang akan dibawa ke PLG terlebih dahulu harus disiapkan truk/alat angkut yang memadai, dan selama dalam pengangkutan hendaknya gajah dalam keadaan terbius yang dosisnya sesuai dengan lama perjalanan. Selain itu cara menurunkan gajah harus hati-hati agar tidak luka.

c. *Penjinakan dan Latihan*

Penjinakan dan Latihan ini bertujuan untuk menghasilkan gajah jinak yang dapat mengikuti perintah pelatih, menunjang kegiatan manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan hewan tarik angkut, menghilangkan citra negatif masyarakat yang menganggap gajah sebagai hama yang merugikan serta untuk melestarikan gajah. Disamping itu PLG juga melatih gajah untuk menjadi gajah satpam atau gajah komando yang merupakan lanjutan dari upaya penjinakan gajah. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gajah didik beserta pawangnya dengan kualifikasi yang diinginkan untuk suatu keperluan tertentu, misalnya untuk dapat digunakan sebagai gajah penjaga keamanan disuatu wilayah yang sering mendapat gangguan dari gajah liar.

Disamping melatih gajah, direncanakan pula PLG akan mendidik pawang penembak mahir dan peramel gajah, dimana lama latihan untuk setiap angkatan adalah 1 (satu) tahun. Pelatihan gajah dimulai pada usia 3 tahun keatas, sedangkan bagi gajah yang berusia 20 tahun keatas akan sukar dilatih karena tenaganya sangat kuat sehingga membahayakan pelatih dan staf pelatih.

Tabel 3 : matrikulasi latihan gajah

No.	Tingkat latihan	Matrikulasi latihan	Lama waktu (bulan)
1	Latihan Tingkat Satu (LTS)	a. Latihan di runk b. Latihan angkat kaki kanan dan kaki kiri c. Jalan di tuntun d. Latihan duduk e. Dinaiki f. Berhenti belok kiri dan kanan g. Mengenal lingkungan	½ ½ 1 1 1 1 3/4
2	Latihan Tingkat dua (LTD)	a. Pemanfaatan pengembalaan kontinyu b. Latihan lingkungan ramai (lanjutan) c. Memberi hormat d. Angkut beban e. Latihan berlari f. Latihan tambahan	1 1 1 1 3
3	Latihan Tingkat Tiga (LTT)	a. Gajah pertunjukan b. Gajah penyeret c. Gajah penangkap	2 2 3

Dimasa yang akan datang diharapkan Pusat Latihan Gajah (PLG) ini akan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu juga diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, pengembangan ilmu pengetahuan, laboratorium satwa liar dan juga sebagai penunjang sarana penanggulangan gangguan gajah.

3. **Pembuatan Zona Penyangga dan Pembatas**

Zona Penyangga atau *Buffer zone* yang dimaksud disini adalah suatu areal dengan luasan tertentu menurut kebutuhan, berada diantara "kantong habitat" gajah dengan areal perkebunan/transmigrasi. Zona penyangga ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi gangguan gajah terhadap perkebunan dan pemukiman disekitarnya. Zona penyangga ditanami aneka tanaman yang menjadi makanan gajah antara lain bambu, tebu-tebuan, gelagah, rumput gajah, pisang, dan lain- lain kesukaan gajah.

Dengan adanya Zona penyangga ini diharapkan apabila ada gajah/kelompok gajah yang keluar dari "kantong habitatnya, mereka akan melewati dan

memakan tumbuhan yang ada di dalam zona penyangga terlebih dahulu, sehingga keberadaan mereka dapat diketahui dan dapat dilakukan pengusiran sebelum mereka masuk ke areal perkebunan atau pemukiman.

Disekitar areal penyangga tersebut dilakukan penjagaan dan didirikan stasiun pengamatan untuk mengamati dan memantau pola jelajah dan jalur pengembaraan gajah serta untuk mengetahui jumlah gajah dalam populasi beserta komposisi umur dan jenis kelaminnya. Di dalam zona penyangga juga dibuatkan *saltlick* yaitu tempat garam. Tempat garam ini perlu dibuat karena pada waktu-waktu tertentu satwa gajah membutuhkan garam untuk penggaraman.

Penetapan lokasi yang perlu dijadikan daerah penyangga (*buffer zone*) diutamakan pada tempat-tempat yang mengalami gangguan gajah dengan intensitas tinggi. Penetapan areal untuk zona penyangga ini diatur sebagai berikut:

- a. *Perkebunan*
Disediakan dari areal perusahaan perkebunan yang bersangkutan dan dikembangkan atas biaya perusahaan. Zona ini merupakan bagian dari unit perkebunannya dan dikembangkan dengan bimbingan teknis dari instansi yang berkompeten menangani permasalahan gajah (Unit KSDA).
- b. *Transmigrasi*
Khusus untuk lokasi kegiatan pemukiman transmigrasi diharapkan agar pihak transmigrasi berupaya untuk mengadakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat transmigrasi agar dapat menanggulangi gangguan gajah secara mandiri dengan cara menanam tanaman di daerah penyangga dengan swadaya murni dari para transmigran. Dalam hal ini pengadaan bibit tanaman yang akan ditanam pada zona penyangga akan disediakan oleh pemerintah melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan, atau lembaga-lembaga lainnya.

Dengan adanya daerah penyangga ini diharapkan gajah tidak langsung merusak/memakan tanaman diareal perkebunan. Daerah penyangga ini juga dapat memudahkan penangkapan terhadap gajah-gajah yang akan dididik di Pusat Latihan Gajah.

BAB IV. PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN GAJAH

A. Jangka Pendek

Upaya penanggulangan gangguan gajah dalam jangka pendek dilakukan dengan berbagai kegiatan pengendalian tradisional. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi gangguan gajah antara lain :

- a. Pembuatan api unggun dilokasi yang dianggap rawan dari serangan gajah.
- b. Menghalau gajah secara bersama-sama.
- c. Membuat parit disekeliling kebun dengan ukuran lebar 3 meter kedalaman 3 meter.
- d. Menggiring gajah ke hutan yang tidak dikonversi, seperti halnya yang dilakukan dipropinsi lain (Lampung, Sumatera Selatan, Aceh).
- e. Pemasangan pagar listrik.

Upaya yang dilakukan seperti tersebut diatas tidak efektif untuk menanggulangi gangguan gajah dalam jangka panjang, karena beberapa dari upaya tersebut memerlukan banyak tenaga dan harus dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu upaya pengamanan, seperti membuat parit dan pagar listrik hanya dapat bertahan dalam waktu yang tidak lama, karena pada akhirnya gajah-gajah tersebut dapat melewati parit-parit yang dibuat dengan cara melandaikannya atau merobohkan pagar listrik dengan menggunakan batang kayu.

Pada prinsipnya semua usaha pengendalian tersebut diatas hasilnya hanya bersifat sementara. Namun demikian sasaran-sasaran pokok usaha tersebut secara positif adalah :

1. Melindungi masyarakat dan petani di pedesaan dari gangguan gajah yang ruang geraknya semakin sempit.
2. Mencegah bertambah luasnya kerusakan tanaman milik rakyat dan
3. Melestarikan gajah dengan cara mengungsikan ke tempat yang lebih sesuai.

B. Jangka Menengah

Dari beberapa kawasan konservasi di Propinsi Riau perlu dioptimalkan fungsinya dengan penanganan yang lebih intensif sebagai habitat akhir dari pada satwa liar khususnya gajah. Hal ini disebabkan beberapa mamalia besar khususnya gajah banyak tersebar di kantong-kantong habitat di luar kawasan konservasi, seperti di Hutan Produksi, HTI dan bahkan sampai ke daerah perkebunan baik perkebunan besar (sawit dan karet) maupun perkebunan masyarakat serta daerah pemukiman transmigrasi. Kawasan konservasi yang perlu segera dioptimalkan fungsinya adalah :

1. SM. Kerumutan 120.000 Ha
2. Rimbang Baling 136.000 Ha

Disamping kawasan ini ada beberapa kawasan hutan yang dapat dikembangkan sebagai daerah pengungsian gajah yaitu :

1. Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
2. Kawasan Hutan produksi Tesso Nilo.

Berdasarkan kondisi kawasan hutan yang terdapat di Propinsi Riau ditentukan lokasi kawasan hutan yang diperkirakan memenuhi syarat sebagai calon lokasi habitat pengungsian, yang akan dipergunakan untuk menampung sekitar 700 - 800 ekor gajah gajah. Lokasi-lokasi tersebut adalah :

1. Kelompok Hutan Produksi Tesso-Nilo daerah Langgam yang telah diusulkan sebagai kawasan habitat gajah dengan luas 1554.000 Ha. Pada lokasi diperkirakan kelayakan kawasan untuk habitat gajah mencapai 80% dari 155.000 Ha \pm 124.000 Ha. Jika 1 ekor gajah memerlukan 400 Ha maka daya tampung kawasan ini mencapai 310 ekor gajah liar. Kawasan Tesso Nilo sendiri terdapat gajah liar \pm 160 ekor terdapat gajah-gajah yang sering mengganggu daerah-daerah Langgam, Segati, Gondai, Pangkalan Kasai dan HTI Nusa Wana Raya. Dari daya tampung dan gajah yang ada di sekitar kawasan ini terdapat sisa kapasitas sebanyak 310 - 160 = 150 ekor.
2. SM. Bukit Rimbang Bukit Baling, dengan 136.000 Ha 30-40 % masih layak sebagai habitat gajah dan banyak terdapat anak sungai yang merupakan kebutuhan gajah. Di kawasan ini memang tidak dijumpai adanya gajah liar yang permanen resident (menetap) di kawasan ini namun daerah ini merupakan bagian dari home range (daerah jelajah) dari gajah-gajah yang berada di Lipat Kain, Kuntu, Tanjung Pauh dan Koto Baru. Kawasan ini mempunyai kapasitas \pm 40.000 - 50.000 Ha yang diperkirakan masih layak untuk gajah \pm 100 ekor.
3. Hutan Konservasi Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan dengan luas 120.000 Ha. Dari luas tersebut diperkirakan 25 - 30 % dapat dipergunakan sebagai habitat gajah. Dan di daerah ini juga terdapat gajah-gajah yang sering mengganggu di daerah Kebun Sari Lembah Subur, Barito dan Tangmigrasi Uku sampai ke Desa Kopau, dengan perkiraan populasi \pm 32 ekor. Dari kawasan 30.000 - 35.000 Ha diperkirakan mampu untuk menampung gajah liar sebanyak \pm 80 ekor.
4. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Sebagian kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh masih layak untuk dijadikan sebagai daerah pengungsian gajah. Gajah liar yang ada di kawasan ini sering mengganggu kawasan di sekitarnya.

Penyebaran gajah liar di daerah ini meliputi Propinsi Jambi dan Riau. Untuk mengetahui luas kawasan yang dapat dipergunakan sebagai daerah pengungsian gajah perlu dilakukan studi yang lebih mendetail. Sebagai perkiraan dari analisa peta topografi diperkirakan 30% dari kawasan ini masih layak untuk habitat gajah liar \pm 40.000 Ha dengan kapasitas \pm 100 ekor. Dari keempat lokasi yang diusulkan tersebut diatas, kawasan hutan Tesso Nilo Langgam dan SM Kerumutan bagian Barat sangat potensial untuk dijadikan sebagai areal pengungsian gajah.

Untuk menyiapkan calon lokasi habitat pengungsian (*Wild life refuge*) agar dapat dijadikan lokasi habitat gajah maka perlu pengembangan selanjutnya dengan usaha penanaman jenis pakan gajah, penyediaan air minum dan penyediaan tempat *saltlick*, pembuatan jalan-jalan inspeksi / patroli dan pembangunan batas permanen berlaspis dengan menggunakan kanal, tanggul dari pagar listrik. Disamping itu juga perlu dibangun sarana dan prasarana, termasuk station pengamatan gajah pada lokasi kantong-kantong habitat sehingga berfungsi sebagai pusat informasi. Selain itu juga perlu dibangun tempat-tempat atraksi dan sarana untuk memanfaatkan gajah sebagai objek wisata.

C. Jangka Panjang

1. Program Kerjasama

Program jangka panjang yang akan dilakukan adalah merealisasikan kegiatan studi mendalam tentang upaya pelestarian gajah bersama dengan WWF atau bekerjasama dengan LSM bidang konservasi alam yang lain.

2. Gajah mitra pembangunan

Dengan besarnya kerugian yang diderita akibat ulah gajah menyebabkan masyarakat menganggap bahwa gajah merupakan hama. Pola pikir demikian sudah waktunya diubah. Gajah bukanlah semata-mata satwa perusak atau pengganggu tetapi akibat dari kelalaian manusia dalam memperlakukan lingkungan maka timbullah masalah gajah tersebut.

Konsep masalah penanganan gajah harus dilakukan secara terpadu, dimulai dengan kegiatan penyuluhan melalui pameran, atraksi kecakapan gajah dan sebagainya. Sebagai salah satu keunikan sekaligus kebanggaan nasional, gajah pada hakekat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Setelah dididik di Pusat Latihan Gajah, akan dihasilkan gajah sebagai sarana angkutan berat, misalnya untuk kegiatan pembalakan. Dibanding dengan alat berat, ternyata penggunaan gajah untuk kegiatan pembalakan mempunyai keuntungan-keuntungan lain, diantaranya tidak dibutuhkan biaya untuk pembuatan jalan, dapat digunakan sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim (kecuali saat birahi), tidak tergantung dari minyak dan suku cadang, dan tidak mencemari lingkungan. Selain, itu kotoran gajah dapat dijadikan pupuk untuk mencegah pemadatan tanah.

Manfaat lain dari penggunaan gajah adalah untuk mencegah gajah liar masuk ke dalam suatu kawasan, untuk keperluan sirkus, film dan dapat dijadikan koleksi kebun binatang dengan atraksinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan. Adanya pemanfaatan-pemanfaatan tersebut, diharapkan akan melahirkan hubungan yang harmonis antara manusia dan gajah. Dengan demikian gajah sebagai mitra pembangunan kiranya akan segera terwujud dan manusia dapat menerima keberadaan gajah di alam bebas sebagai komponen suatu ekosistem alami.

BAB V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam upaya penanggulangan dan konservasi gajah perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral dan instansi terkait maupun partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan masyarakat transmigrasi. Upaya ini merupakan upaya jangka panjang dimana dalam pelaksanaannya harus berkesinambungan.

Dengan kondisi alam yang ada pada saat ini sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang layak bagi upaya pengembangan habitat gajah secara alami atau semi alami. Oleh karena itu sebagai upaya untuk pencegahan gangguan gajah perlu dikembangkan daerah penyangga (*buffer zone*) di sekitar areal perkebunan dan transmigrasi yang sering mendapat gangguan.

Selain itu untuk mempertahankan kelestarian gajah, telah dikembangkan Pusat Latihan Gajah (PLG). Pusat Latihan Gajah ini dikembangkan untuk mendapatkan gajah satpam atau gajah komando dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, memperluas lapangan kerja, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Saran-saran

Untuk menanggulangi dan melestarikan gajah diharapkan adanya persamaan persepsi, sehingga seluruh masyarakat dan instansi yang ada memiliki pandangan yang sama dalam melihat gajah sebagai salah satu bagian dari ekosistem alam. Beberapa pandangan tersebut antara lain :

1. Menanggulangi gangguan gajah dengan memperhatikan aspek kelestarian bukan dengan membunuhnya.
2. Menyiapkan lokasi yang layak dan cukup untuk daerah khusus habitat gajah, seperti daerah Tesso Nilo dan didukung dasar hukum yang kuat.
3. Mengupayakan penyediaan zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar areal perkebunan/transmigrasi untuk mencegah/menghambat serangan gajah terhadap tanaman perkebunan/transmigrasi.
4. Melatih gajah yang masih muda untuk dimanfaatkan sebagai "Mitra Pembangunan", sedangkan yang tua diungsikan ke habitat pengungsian yang mempunyai persyaratan cocok.
5. Menangani masalah gajah dan konservasinya dengan usaha-usaha dan biaya yang berkesinambungan secara terpadu dan tuntas.
6. Menghimbau kepada segenap lapisan masyarakat urutuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan konservasi gajah, baik dalam bentuk dana, tenaga, maupun pemikiran.

**PENYEBARAN KELAYAKAN HABITAT DAN POPULASI GAJAH
SERTA GAJAH YANG PERLU DIRELOKASI
DI PROPINSI RIAU TAHUN 1999**

No.	Lokasi Kawasan Hutan	Kabupaten	Luas (Ha)	Kelayakan		Pop. Gajah		Vegetasi	Topografi	Perubahan
				%	Ha	Kel	Ekor			
I	HABITAT DAN GAJAH YANG PERLU DIBINA									
A	SM SIAM SIAM KECIL	Rokan Hulu Siak	90.790	9,36	8.500	2	70	LOA	Datar	Sebagian telah dirambah & dekat pemukiman
B	HPT MINAS MANDAU, BUKIT KAPUR	Siak	367.830	14,95	55.000	1	35	LOA	Datar	Sebagian areal dirambah
C	SM KERUMUNAN	Pelalawan & Indragiri Hulu	92.600	59,94	55.500	1	35	Vigin	Datar	Ada Perubahan
D	SM BUKIT RIBRANG BUKIT BALING	Kampar & Kuantan Sangi	136.000	35,00	47.600	1	32	Vigin	Bergelombang & Bukit	Ada Perubahan
E	SM BALAJ RAJA	Dengkai	18.000	25,00	4.500	2	55	Vigin 25 %	Datar	Ada Perubahan
F	HPT TESSO NILO AIR HITAM BASERAH	Kampar & Indragiri Hulu Kuansing, Pelalawan	372.965	21,45	80.000	5	158	LOA	Datar & Bergelombang	Perubahan 75 % x luas, dekat pemukiman & lahan sawah
G	TN BUKIT TUJAPULUH	Indragiri Hulu/Indragiri Hulu	127.698	31,32	40.000	1	70	LOA & Vigin	Datar & Bergelombang	Ada Perubahan
H	HPT SERANGKIE SENGKILLO	Indragiri Hulu	133.295	9,00	12.000	1	30	LOA	Datar & Bergelombang	Ada Perubahan
I	KELOMPOK HUTAN KALAM HAPAYAN BONENG (Lokasi Suro Gudang)	Siak, Rokan Hulu	12.800	100,000	12.800	1	30	LOA	Datar & Bergelombang	Ada Perubahan
J	HL MAHATO (Mahato, Dahu-Dahu, Sei Betang Kuru)	Rokan Hulu	17.796	100,000	17.796	1	40	Sebagian vigin	Datar & Bergelombang	Perubahan sebagian
K	HP BAGAN SEAPI API	Rokan Hulu	159.300	179,00	17.900	1	16	LOA & Vigin	Datar & Bergelombang	Perubahan sebagian
L	PLG SEBANGAN DURI	Siak	5.000	25,00	1.250	-	56	LOA	Datar	Perubahan sebagian
	JUMLAH		1.534.074		352.846		627			Perubahan 75 % x luas

II GAJAH YANG PERLU DIRELOKASI										
A	HULU SUNGAI GANGSAL KERITANG	Indragiri Hulu	76.600	Tidak layak	1	30	LOA	Datar	Perubahan merata	
B	HPT TANJUNG PAUH	Kampar	19.367	Tidak layak	1	10	LOA	Datar & bergelombang	Perubahan merata	
C	HPT MINAS, MANDAU, BUKIT KAPUR	Siak	367.820	Tidak layak	1	35	LOA	Datar & bergelombang	Perubahan merata	
D	HPT BATU GAJAH	Kampar	36.965	Tidak layak	2	60	LOA	Datar & bergelombang	Perubahan merata	
E	HL BUKIT SULIGI	Kampar	30.695	Tidak layak	1	8	LOA & Vigin	Datar, Bukit, Bergelombang	Perubahan sporadis	
F	HP TANJUNG MEDAN	Rokan Hulu	59.000	Tidak layak	1	30	LOA	Datar & bergelombang	Perubahan merata	
	JUMLAH II		590.447			173				
	JUMLAH I+II		2.124.521			800				

Keterangan : Pop gajah
Kel
LOA

= Populasi gajah
= Kelompok
= Log of Area

Catatan:
Kriteria layak

- Topografi < 25%
- Keadaan tanah kering
- Jauh dari pemukiman
- Terdapat Pakan, tumbuhan bergetah
- Terdapat Sumber Air

keterlibatan masyarakat lokal yang tersebar di sekitar kawasan tersebut. Serta perlu pertimbangan khusus karena populasi tersebut berada di bawah 50 ekor. Pembuatan koridor ke kawasan konservasi lain yang masih ditempati Harimau Sumatera sebagai bagian dari upaya pembaharuan genetik, sangat diperlukan.

VII. BAHAN BACAAN

1. Startegi Konservasi Harimau Sumatera. Ditjen PHPA, Dep. Kehutanan. 1994
2. Prosiding Workshop Nasional I, Penyusunan Startegi dan rencana Aksi Biodiversitas Indonesia-IBSAP. Bogor, 6-7 November 2001
3. Laporan Monitoring Populasi dan Habitat Harimau Sumatera di Areal PT. Asiatic Persada dan PT. Asialog. Unit KSDA Jambi, Mei 2002
4. Laporan Monitoring Kondisi Umum Kawasan Sekitar PT. Asialog dan PT. Asiatic Persada. Yayasan Warsi, September 2001
5. Laporan Pendampingan Kegiatan Audit Lingkungan PT. Asiatic persada. Yayasan Gita Buana, Jambi 2000
6. Menjamin Pelestarian Harimau Jangka Panjang; Memadukan Pelestarian dan Pembangunan di Sumatera. Kathy Mac Cinon.

NAMA – NAMA KORAN / MEDIA CETAK YANG TELAH MEMBERITAKAN LOKAKARYA SATWA

1. Kudus Berita Nasional ANTARA (Internasional) tanggal 4 – Agustus – 2002
2. Berita Buana, tanggal 7 – Agustus – 2002
3. Media Indonesia, (2 x) tanggal 7 – Agustus – 2002 dan 8 – Agustus – 2002
4. Harian Terak, tanggal 7 – Agustus – 2002
5. Tempo News Room / Internet 1, tanggal 7 – Agustus – 2002
6. Media Indonesia, tanggal 7 – Agustus – 2002
7. Pos Kota, tanggal 9 – Agustus – 2002
8. Republik, tanggal 10 – Agustus – 2002
9. Sinar Pagi, tanggal 7 – Agustus – 2002
10. Suara Pembangunan, tanggal 10 – Agustus – 2002
11. The Jakarta Post, tanggal 8 – Agustus – 2002
12. Sarjana Pagi, tanggal 8 – Agustus – 2002
13. Sinar Harapan, tanggal 10 – Agustus – 2002
14. Radar Bogor, tanggal 7 – Agustus – 2002
15. Pemberitaan RRI (Radio Republik Indonesia), tanggal 8 – Agustus – 2002, pada pukul 19.00 WIB
16. Majalah Forum Kesehatan, tanggal 18 – Agustus – 2002
17. Invenstar Indonesia, tanggal 18 – Agustus – 2002
18. Rakyat Merdeka
19. Pikiran Rakyat



LIPUTAN – LIPUTAN BERITA

MENYANGKAN HASIL LIPUTANNYA TENTANG LOKAKARYA SATWA

1. TVRI, tanggal 4 – Agustus – 2002 dan 5 – Agustus – 2002 pada pukul 08.00 WIB dan pada pukul 19.00 WIB
2. RCTI, tanggal 4 – Agustus – 2002 pada pukul 19.00 WIB dan pada pukul 23.00 WIB
3. TPI2, tanggal 4 – Agustus – 2002 pada pukul 19.00 WIB
4. Ananda, tanggal 4 – Agustus – 2002 pada pukul 17.00 WIB
5. Indragiri, tanggal 4 – Agustus – 2002 pada pukul 16.30 WIB
6. Metro TV, tanggal 4 – Agustus – 2002 pada pukul 15.00 WIB
7. S.C.T.V, tanggal 4 – Agustus – 2002 pada pukul 14.00 WIB
8. Trans TV, tanggal 4 – Agustus – 2002
9. LRTV, tanggal 4 – Agustus – 2002
10. TM 2, tanggal 4 – Agustus – 2002 pada pukul 13.30 WIB dan pada pukul 23.00 WIB

NAMA – NAMA KORAN / MEDIA CETAK YANG TELAH MEMBERITAKAN LOKAKARYA SATWA

1. **Kantor Berita Nasional ANTARA** (Internet), tanggal 6 – Agustus – 2002.
2. **Berita Buana**, tanggal 7 – Agustus – 2002.
3. **Bisnis Indonesia**, (2 x) tanggal 7–Agustus–2002 dan 8–Agustus– 2002.
4. **Harian Terbit**, tanggal 7 - Agustus – 2002.
5. **Tempo News Room** (Internet), tanggal 7 – Agustus – 2002.
6. **Media Indonesia**, tanggal 7 – Agustus – 2002.
7. **Pos Kota**, tanggal 9 – Agustus – 2002.
8. **Republika**, tanggal 10 – Agustus – 2002.
9. **Sinar Pagi**, tanggal 7 – Agustus – 2002.
10. **Suara Pembaharuan**, tanggal 10 – Agustus – 2002.
11. **The Jakarta Post**, tanggal 8 – Agustus – 2002.
12. **Sentana Pagi**, tanggal 8 – Agustus – 2002.
13. **Sinar Harapan**, tanggal 10 – Agustus – 2002.
14. **Radar Bogor**, tanggal 7 – Agustus – 2002.
15. **Pemberitaan R.R.I (Radio Republik Indonesia)**, tanggal 6–Agustus–2002, Berita pukul 19.00 WIB.
16. **Majalah Forum Keadilan**, tanggal 18 – Agustus – 2002.
17. **Investor Indonesia**, tanggal 9 – Agustus – 2002.
18. **Rakyat Merdeka**
19. **Pikiran Rakyat**

MEDIA ELEKTRONIK YANG HADIR DAN TELAH MENAYANGKAN HASIL LIPUTANNYA TENTANG LOKAKARYA SATWA

1. **TVRI** ; tanggal 6 – Agustus – 2002 dan 7 – Agustus – 2002 Berita Pagi, pukul 06.00 WIB dan Berita Petang, pukul 18.00 WIB.
2. **RCTI**; tanggal 6 – Agustus – 2002 Seputar Indonesia, pukul 18.30 WIB dan Buletin Malam, pukul 23.00 WIB.
3. **T.P.I** ; tanggal 6 – Agustus – 2002 Lintas 5, pukul 17.00 WIB.
4. **Anteve** ; tanggal 6 – Agustus – 2002 Cakrawala, pukul 17.00 WIB.
5. **Indosiar** ; tanggal 6 – Agustus – 2002 Fokus Sore, pukul 16.30 WIB.
6. **Metro TV** ; tanggal 6 – Agustus – 2002 Metro Sore, pukul 18.00 WIB.
7. **S.C.T.V** ; tanggal 7 – Agustus – 2002 Liputan 6 Petang, pukul 18.00 WIB.
8. **Trans TV** ; tanggal 6 – Agustus – 2002.
9. **Lativi** ; tanggal 6 – Agustus – 2002.
10. **TV 7** ; tanggal 6 – Agustus – 2002 Tajuk Sore, pukul 17.30 WIB dan Tajuk Malam, pukul 23.00 WIB.



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

--	--

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES

ANTARA KOMPAS REPUBLIKA MAJALAH TEMPO

BERITA BUANA MEDIA INDONESIA SINAR PAGI MAJALAH FORUM

BISNIS INDONESIA NERACA SUARA PEMBARUAN SINAR HARAPAN

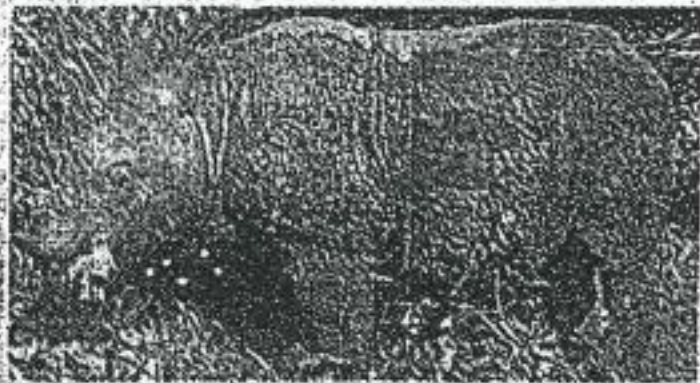
BUSSINESS NEWS PIKIRAN RAKYAT SUARA KARYA *Rakyat Bopri*

HARIAN TERBIT POS KOTA THE JAKARTA POST

KORAN TEMPO RAKYAT MERDEKA SENTANA PAGI

Gawat! Badak, Gajah, dan Harimau Sumatra bakal Punah

CIPAYUNG-Tujuh sampai 12 tahun lagi, tiga jenis satwa langka, yakni harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) dan gajah sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*) terancam punah menyusul makin gencarnya perburuan dan perdagangan ilegal terhadap mereka. Hal tersebut diungkapkan perwakilan World Wild Fund (WWF) Indonesia Chairul Saleh dalam lokakarya anti perburuan dan perdagangan ilegal harimau sumatra dan produk-produknya serta deklarasi jaringan advokasi Harimau, Badak dan Gajah di Wisma Jayaraya, Cipayung, kemarin.



Dicerorhinus sumatrensis, satwa langka yang nyaris punah.

Jumlah mereka (harimau, badak, dan gajah) di lapangan kurang lebih tinggal 300 ekor, namun dengan semakin gencarnya perburuan satwa langka, populasi mereka makin terancam.

Chairul Chairul. Lajutnya, disamping menghentikan perburuan, juga penting menjaga stabilitas populasi hewan mangsanya. Misalnya menerapkan sanksi hukum secara konsisten bagi eksploitasi satwa mangsa harimau. Sementara itu Direktorat Jenderal Perindungan dan Konservasi Alam (PHKA), I Made Subadja mengakui lemahnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu faktor terancam punahnya ber-

agam satwa langka di tanah air. Menurut Made, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menjadikannya sebagai negara pusat konservasi dunia. Sayangnya, lanjut Made, populasi berbagai jenis satwa yang ada di Indonesia seperti harimau, badak, dan gajah sumatera saat ini berada dalam bahaya. Hal ini terjadi bukan karena habitatnya menyempit, melainkan akibat perburuan untuk diperdagangkan. Perburuan untuk diperdagangkan itu, biang utamanya, disamping lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi satwa, papar Made Subadja.

Karenanya untuk merumuskan strategi dan program penyelamatan satwa langka terutama harimau, gajah, dan badak, 160 orang peserta dari Jaringan advokasi Harimau, Badak, dan Gajah (JAHBG), menggelar lokakarya anti perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka di hotel Jayaraya, Cipayung, yang berakhir Kamis (8/8) besok. Selain menggelar lokakarya, anggota dan simpatisan JAHBG, diantaranya Direktur Jenderal PHKA, Fauna Flora Internasional (FFI), yayasan WWF Indonesia juga mendeklarasikan jaringan advokasi harimau, Badak, dan gajah Sumatera.

Bersambung →



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

--	--

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES

ANTARA KOMPAS REPUBLIKA MAJALAH TEMPO

BERITA BUANA MEDIA INDONESIA SINAR PAGI MAJALAH FORUM

BISNIS INDONESIA NERACA SUARA PEMBARUAN SINAR HARAPAN

BUSSINESS NEWS PIKIRAN RAKYAT SUARA KARYA *Rakyat Bopri*

HARIAN TERBIT POS KOTA THE JAKARTA POST

KORAN TEMPO RAKYAT MERDEKA SENTANA PAGI

Jambuan →

DISELUNDUPKAN KELUAR NEGERI

Perdagangan ilegal satwa langka, tidak terjadi di dalam negeri, tetapi juga diselundupkan ke luar negeri. Walaupun belum ada penghitungan secara pasti namun diduga nilai ekonomi penyelundupan satwa

langka ke luar negeri lebih besar dari penyelundupan kayu.

"Jumlah dilapangan tinggal dibawah 300 ekor, namun dengan semakin gencarnya perburuan satwa langka tersebut akan mengancam kepunahan," ujar Chairul Saleh dari WWF Indonesia. Acara lokakarya anti perburuan dan perdagangan ilegal harimau, gajah, dan badak sumatera dan deklarasi jaringan advokasi tiga satwa tersebut, dimulai pukul tepat 9:00. Sebelum dimulai diadakan pemusnahan satwa liar yang siap di jual belikan. Satwa liar yang sudah diawetkan dan siap untuk dijual belikan, yang sudah dibunuh oleh pemburu diantaranya harimau, anoa, penyu, burung cendrawasih. (unt/cay)



--	--

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tel. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BUN: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DES																														
<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO																											
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input type="checkbox"/> SINAR Pagi	<input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH FORUM																											
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> KERACA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN																											
<input type="checkbox"/> BUSSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA																												
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input type="checkbox"/> POS KOTA	<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST																												
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI																												

Tujuh tahun mendatang, harimau Sumatra diperkirakan punah karena ulah para pemburu hewan langka.

Harimau Sumatra Terus Dibunuh

Sedikitnya 33 ekor harimau Sumatra mati terbunuh tiap tahun. Itu menurut catatan Hary Alexander, Panitia Acara Jaringan Advokasi Harimau Badak-Gajah (A-HBG) dalam "Lokarya Aksi Perburuan dan Perdagangan Ilegal HBG" di Bogor, Selasa, 9 Agustus 2002. Treves kepencikan hewan yang dilindungi itu tampaknya sulit dihindari karena para pemburu hewan langka tetap berkejar-kejar di hutan-hutan Sumatra.

Meenka—para pemburu itu—menyebut A-HBG, hutan-hutan mereka mengincar harimau, melinkan juga badak Sumatra. Dalam 10 tahun terakhir, populasi badak Sumatra menurun hingga lebih dari 50 persen. Bila pada 1993 masih ada sekitar 400 ekor, maka pada 2002 hanya tersisa 150 ekor. Diceritakan perselaran badak pun menyusut drastis. Dulu, 1993, terdapat 30 kawanan yang dihuni oleh kalang badak. Namun, sekarang, badak-badak itu hanya dapat dilihat di empat titik kawasan.

Yang cukup mengejutkan, selain menambuni harimau dan badak, para pemburu itu juga memburu gajah dengan menggunakan racun. Beberapa kasus yang menentang, antara lain, peracunan 22 ekor di Bukit pada 1986, kemudian 17 ekor mati di Sumatra Utara pada Mei 2002, dan minimal 12 ekor gajah mati di bukit di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada periode 1986—2002.

Sementara itu, data tentang perburuan itu

gal antara tersebut ke luar negeri dari Direktorat Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam, Departemen Kehutanan (Dephut), memperkirakan angka yang mengejutkan. Sekitaranya 40 persen volume perdagangan tulang harimau pada periode 1970—1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia. "Kami khawatir, nilainya melebihi penyediaan daging," kata I Made Salsadia, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam Dephut, dalam lokakaryanya di Bogor tersebut.

Tingginya harga satwa langka adalah faktor pendorong yang mendorong para pemburu menargetkan atau menambuni harimau, badak, dan gajah. Namun, lamanya pengalaman hukum bagi perlindungan satwa merupakan penyebab utama masih banyaknya perburuan dan perdagangan ilegal binatang-binatang itu. Hal ini menurut A-HBG, disebabkan berbagai hambatan struktural, struktural, dan kultural dalam upaya mendukung proses penegakan hukum yang efektif. "Terkadang para pemburu itu dihukum, tetapi setelah itu mereka orang tidak jera berburu," kata Hary Alexander dari A-HBG.

Keterlambatan hukunya, para pelindung hewan langka tidak memiliki data yang memadai. Beberapa data dasar seperti populasi, distribusi, habitat, investigasi aktivitas perburuan, perdagangan, dan kepemilikan serta berbagai permasalahan



--	--

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tel. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BUN: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DES																														
<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO																											
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input type="checkbox"/> SINAR Pagi	<input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH FORUM																											
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> NERACA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN																											
<input type="checkbox"/> BUSSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA																												
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input type="checkbox"/> POS KOTA	<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST																												
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI																												



HARIMAU SUMATRA, Punah dalam tujuh tahun mendatang

yang menjadi ancaman terhadap kelestarian HBG, direseksi penting untuk mendukung upaya penegakan hukum dan pencharuan kebijakan bidang konservasi satwa dilindungi. Kamisi tersebut, menurut Hary, dapat buruh oleh soal daya

pengelabuan, kesamaan, dan kepedulian Apical peiregek hutan dan masyarakat luas terhadap pealangnya nilai konservasi satwa liar, khususnya HBG.

Untuk mengatasi kepunahan itu, Yayasan World Wide Fund (WWF) Indonesia mendukung Pemerintah Indonesia segera mengheatkan tindakan perburuan yang belakangan makin marak. Jika tidak, satwa-satwa liar yang dibudungi itu akan punah. Harimau Sumatra, misalnya, dengan tingkat perburuan seperti ini sekarang, diperkirakan punah dalam kurun waktu tujuh hingga 12 tahun ke Depan. Nasib mereka akan sama seperti lipitiza Jawa dan harimau Bali yang sudah lebih dulu punah total.

WWF Indonesia juga menyarankan agar populasi hewan mangsa HBG—serpikal hijau atau kelinci hutan—dijaga. Manusia yang secara berlebihan memburu hewan-satwa langka ini harus dikenai sanksi hukum. "Tindakan ini harus diterapkan sampai tingkat daerah," kata Hary Tabala Wibisono dari Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS IP).

Selain itu, Hary Alexander meminta Pemerintah Indonesia, yang sudah meratifikasi ketetapan *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) harus konsistensi mengimplementasikan ketentuan yang berlaku. Untuk menghadapi masalah konservasi HBG, para pemburu dan pembunuh dapat dikenai sanksi dan hukuman dengan pasal yang berapis.

Lagi pula, undang-undang (UU) yang mengatur sudah jelas, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Ancaman hukuman hanya mencapai 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah," ujar



--	--

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BLN:	<input type="checkbox"/> JAN	<input type="checkbox"/> FEB	<input type="checkbox"/> MAR	<input type="checkbox"/> APR	<input type="checkbox"/> MEI	<input type="checkbox"/> JUNI	<input type="checkbox"/> JULI	<input checked="" type="checkbox"/> AGST	<input type="checkbox"/> SEPT	<input type="checkbox"/> OKT	<input type="checkbox"/> NOV	<input type="checkbox"/> DES																			
<input type="checkbox"/> ANTARA					<input type="checkbox"/> KOMPAS					<input type="checkbox"/> REPUBLIKA					<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO																
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA					<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA					<input type="checkbox"/> SINAR PAGI					<input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH FORUM																
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA					<input type="checkbox"/> NERACA					<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN					<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN																
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS					<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT					<input type="checkbox"/> SUARA KARYA					<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT					<input type="checkbox"/> POS KOTA					<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST					<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO					<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA					<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI					<input type="checkbox"/>																

Hazy

Masalahnya, berapakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dephut yang menanggapi kasus-kasus tersebut bertindak tegas? Sejalan, seperti ditunjukkan Hazy, perburuan itu ternyata melibatkan administrasi Forestry National Indonesia (FNI) Hazy menent

akan, dan apa, walhasil polisi Lampung berhasil menangkap para pemburu. Dalam pengalamannya, para pemburu itu memang dibayar, dan para polisi ditugaskan Lant. Tapi, dimana greva tersebut tak pernah di-santun oleh buhar

Prasop



--	--

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BLN:	<input type="checkbox"/> JAN	<input type="checkbox"/> FEB	<input type="checkbox"/> MAR	<input type="checkbox"/> APR	<input type="checkbox"/> MEI	<input type="checkbox"/> JUNI	<input type="checkbox"/> JULI	<input checked="" type="checkbox"/> AGST	<input type="checkbox"/> SEPT	<input type="checkbox"/> OKT	<input type="checkbox"/> NOV	<input type="checkbox"/> DES																			
<input type="checkbox"/> ANTARA					<input type="checkbox"/> KOMPAS					<input type="checkbox"/> REPUBLIKA					<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO																
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA					<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA					<input type="checkbox"/> SINAR PAGI					<input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH FORUM																
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA					<input type="checkbox"/> NERACA					<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN					<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN																
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS					<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT					<input type="checkbox"/> SUARA KARYA					<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT					<input type="checkbox"/> POS KOTA					<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST					<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO					<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA					<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI					<input type="checkbox"/>																

Hary Alexander:

"Ada Kongkalkong"

Hazy, becak, dan gajah (HBG) di predileksi tak hanya di kalangan masyarakat di bagian Indonesia karena hal ini dibarengi Hary Alexander, Panitia Acara Hujung Adiwasi HBG, dan masyarakat generasi muda dalam mungkin banyak akan menggapai HBG dari gambar atau cerita. Itulah sebabnya lembaga yang dipimpinnya berusahakan untuk menghehekan perburuan binatang-bintang tersebut.

Semula media lembaga itu akan mengedukasi agar binatang-bintang tersebut tak punah. Berikut ini beberapa wawancara Hary dengan Mustopa dari FORUM.

Apakah rekomendasi dari lokakarya yang diarahkan Jaringan Advokasi HBG?

Pertama, penanganannya membangun data base untuk mendata populasi, perburuan, tingkat pidana, dan penyebab satwa HBG. Data itu amat diperlihatkan untuk menentukan langkah perlindungan satwa tersebut.

Kedua, perlu pendirian atau perundang-undangan, kebijakan, dan ta. perornisalan aparatur dalam rangka proses penegakan hukum yang efektif. Pemerintah telah mengundekkan pada 2003 harus sudah ada undang-undang konservasi yang baru.

Selanjutnya undang-undang dan kebijakan yang ada tidak benar. Ketiga, perlu dibuat sistem peradilan webal yang terpadu terlang linde pidana satwa. Keempat, perlu adanya penindakan hukum yang pelaka-pelaku usaha perburuan satwa.

... dan diteliti sanksi hukum yang seberapa beratnya.

Selanjutnya, apa yang menyebabkan perburuan terus berlangsung?

Saya pernah turun langsung ke lapangan selama ini di apa tahun. Ternyata ada peran kepolda yang masih memaksa UU No 4 Tahun 1967 tentang Lingkungan. Pada tahun 1997, UU itu sudah diganti. Apa juga yang masih terpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selanjutnya, kadang-kadang perburuan itu terjadi karena ada insiner yang terikat, polisi atau hakim yang membolehkan orang berburu. Contohnya di Lampung, ada dua perburu yang TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam perburuan satwa, namun ternyata yang dilat yang menyebabkan dan terlatanya yang mendampingi. Dalam kasus ini, jadi ada kongkalkong dengan masyarakat Kehutanan.

Apakah solusi konkretnya?

Ada yang terlat yang menghehekan perburuan diperburu ke as. Kapas. Sama berburu. Kalau dia menggapai ini akan melakukan solusi. Ada, ada, ada, ada, ada.

Apakah perlu aparat hukum, seperti jaksa, dituntut secara khusus agar mengerti masalah konservasi?

Pertama ini harus meneliti masalah.



--	--

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BLN: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOP <input type="checkbox"/> DES																														
<input type="checkbox"/> ANTARA						<input type="checkbox"/> KOMPAS						<input type="checkbox"/> REPUBLIKA						<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO												
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA						<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA						<input type="checkbox"/> SINAR PAGI						<input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH FORUM												
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA						<input type="checkbox"/> NERACA						<input type="checkbox"/> SUARA PEMBANGUNAN						<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN												
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS						<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT						<input type="checkbox"/> SUARA KARYA						<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT						<input type="checkbox"/> POS KOTA						<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST						<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO						<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA						<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI						<input type="checkbox"/>												

Uraian oleh Menteri: Pengembangan Urut-urutan Nabiel Makacim. Jadi, urutan Nabiel akan dibentuk dalam dan jasa yang khusus menangani masalah masalah lingkungan. Ini ide yang menarik, tapi Nabiel sebagai eksekutif telah melakukan inovasi terhadap Mahkamah Agung. Namun, gagasan itu tetap menarik. Minimal, nanti akan mendorong para hakim agar menjadi masalah-masalah lingkungan ataupun konservasi sebagai masalah hukum.

FORJIM Sains No. 12, 16 Agustus 2002



19

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BLN: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOP <input type="checkbox"/> DES																														
<input type="checkbox"/> ANTARA						<input type="checkbox"/> KOMPAS						<input type="checkbox"/> REPUBLIKA						<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO												
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA						<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA						<input type="checkbox"/> SINAR PAGI						<input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM												
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA						<input type="checkbox"/> NERACA						<input type="checkbox"/> SUARA PEMBANGUNAN						<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN												
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS						<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT						<input type="checkbox"/> SUARA KARYA						<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT						<input type="checkbox"/> POS KOTA						<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST						<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO						<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA						<input checked="" type="checkbox"/> SENTANA PAGI						<input type="checkbox"/>												

Terungkap dari Lokakarya Anti Perburuan Dirjen PHKA Dephut: Keberadaan Satwa Langka Semakin Terancam

Jakarta, Harian SENTANA. OPERASI satwa langka yang digelar belasan lama ini atas kerja sama Polri dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan ternyata membuahkan hasil. Hal ini terbukti ketika dilaksanakannya pemusatan dengan membakar hutan bukit hasil tangkapan atas operasi terakhir berupa satwa langka yang telah diawetkan seperti Harimau Sumatera, Rusa, Beruang, Penyul, dan lain-lain.

Demikian disampaikan Dirjen PHKA Dephut, J. Made Subadja, Cel-Gel, ketika membuka lokakarya Anti Perburuan dan Perdagangan Illegal Hewan dan Produk-produknya secara Deklarasi Jaringan Advokasi Hutan, Badak dan Gajah, Selasa (6/8) di Pangkajene, Sulawesi Selatan.

"Langkah awal ini kita laksanakan dengan harapan dapat diikuti oleh teman-teman di daerah dalam rangka menggalakan supremasi hukum di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam terutama pemberantasan perburuan satwa langka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pusat konservasi dunia. Namun menurut Made, saat ini berbagai jenis satwa seperti harimau Sumatera, badak sumatera dan gajah sumatera, telah punah. Hal ini terjadi tidak hanya karena habitat yang semakin menyempit, tetapi juga karena perburuan dan perdagangan yang masih berlangsung. Hal ini disebabkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam, ujarnya.

Made menilai sepuluh tahun terakhir ini populasi harimau sumatera sangat menurun. Bahkan, setidaknya 33 ekor mati terbunuh setiap tahunnya. Demikian pula dengan badak sumatera, lebih dari 60% populasi badak sumatera mengalami penurunan, tercatat populasi tahun 1993 sebanyak 400 ekor dan menurun menjadi 150 ekor pada tahun 2002, sementara itu pemusatan gajah masih terus berlangsung secara terus-menerus, terbukti 12 ekor gajah mati karena diremuk pada tahun 1999 di Riau, 17 ekor mati di Sumatera utara pada bulan Mei 2002, ke-mudisan pada tahun 1996-2002 sebanyak 12 ekor masih terbunuh di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Ketika disinggung keberadaan Dephut menangani satwa langka yang saat ini banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh orang kaya, pejabat dan mantan jenderal, Dirjen PHKA mengatakan kita Urgat Jitu statusnya, karena beberapa waktu yang lalu Dephut pernah melakukan pemusatan jika terbukti memiliki satwa langka tanpa ijin akan dituntut, katanya. ■MARION



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BES: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DES
<input type="checkbox"/> ANTARA <input type="checkbox"/> KOMPASS <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> SINAR PAGI <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT <input type="checkbox"/> POS KOTA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> SENTANA PAGI <input type="checkbox"/>

Perdagangan Harimau Ilegal Harus Ditindak Tegas

Jakarta, Sinar Harapan - Direktorat Advokasi Harimau, Badak dan Gajah (HAB) sebagai jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli konservasi dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA) Jumat menyampaikan deklarasi anti perburuan dan perdagangan HBG.

Menurut jaringan LSM ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki kerangka regulasi yang baik dan menjadi negara pusat konservasi dunia. Tetapi berbagai jenis satwa di Indonesia, termasuk Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Gajah Sumatera saat ini berada dalam kondisi terancam punah, tidak hanya karena habitat yang makin menyempit, tapi juga karena perburuan untuk diperdagangkan.

Kejadian karena lemahnya penegakan hukum, belum dilakukannya bidang konservasi sumber daya alam sebagai prioritas utama program pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam.

Sementara itu, Dirjen PHKA, I Made Sihaloho di Jakarta Jumat menyatakan, perdagangan ilegal satwa langka tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga diselundupkan ke luar negeri. Walaupun belum ada perburuan yang pasti, Dirjen menduga, nilai ekonomi penyelundupan satwa langka ke luar negeri lebih besar dari penyelundupan kayu.

"Untuk itu, pemerintah mengajak berbagai pihak untuk melakukan kerja sama semua pihak serta meniadakan perburuan HBG," tandasnya.

Salah satu Yayasan WWF Indonesia menambahkan, perburuan dan pemburuan HBG harus dihentikan segera. Selain jika tidak dengan kecepatan tindakan seperti sekarang ini, maka dalam kurun waktu 7 sampai 12 tahun ke depan populasi liar di alam Harimau Sumatera akan punah.

"Untuk menyelamatkan Harimau Sumatera dan perburuan dan perdagangan liar pemerintah harus tegas menindak pelakunya," tegasnya.

Di sisi lain, Wildomar Hosholan, Manajer Program Konservasi Harimau Sumatera, mengungkapkan, untuk menyelamatkan Harimau Sumatera, tim pitulanya sedang membentuk Tiger Protection Unit (TPO) yang akan terintegrasi dengan monitoring program kolaborasi PHKA secara, seperti in demen Conservation

Program (IRCP-PHKA), International Rhino Foundation dan WWF. "Selain kegiatan patroll keamanan, unit unit ini juga akan melaksanakan kegiatan, antara lain, berupa investigasi perburuan dan perdagangan serta konflik manusia dan HBG di Pulau Sumatera," katanya.

Sementara itu, AA Julabesat, Manajer Program IRCP-PHKA melihat, bahwa upaya menegahi perburuan Badak di Indonesia masih sangat perlu diintensifkan.

"Pemerintah harus konsisten mengimplementasikan konvensi Cites (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna) dalam menangani permasalahan konservasi Harimau, Badak dan Gajah dan produk-produknya," kata Daniel Walter Sinaga dari CITES Tiger Enforcement Task Force, Dirjen PHKA juga.



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BES: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DES
<input type="checkbox"/> ANTARA <input type="checkbox"/> KOMPASS <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> SINAR PAGI <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT <input type="checkbox"/> POS KOTA <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> SENTANA PAGI <input type="checkbox"/>

rhino can be found in Sumatra, Malaysia and Myanmar.

The hunting and illegal trade of these endangered animals is a lucrative business. Those involved in the trade can make millions of rupiah from the sale of the bones, tusks, ivory and fur of the animals.

A stuffed Sumatran tiger can fetch Rp 25 million (US\$2,700) when sold to buyers.

Indonesia is also a haven for the international trade in endangered animals, an illegal activity that ranks only behind drug trafficking in profitability.

The illegal trade of rare

animals in Sumatra has been linked to a Malaysian trader known as Mr. T, and a South Korean businessman based in Indonesia.

"As far as we know, the businessmen are still involved in the illegal trade, exporting the items to other countries.

Their mode of operation can involve illegal logging activities, hiding the protected animals among unprotected ones, transporting the animals and their parts in containers with fake documents, or just simply carrying the animals out of the country with them," Harry said.

According to him, Singapore, Malaysia, the Philippines, South Korea and Taiwan were the major export destinations for the animals.

The main export gates are Medan in North Sumatra, Jakarta, Balau in Riau, Bali and Makassar in South Sulawesi, he said.

Based on Law No. 5/1990 on the conservation of natural resources, those involved in the trade of endangered animals can receive five-year prison sentences and a fine of Rp 100 million.



01

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Bln: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MARE <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGUST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DES			
<input type="checkbox"/> ANTARA <input checked="" type="checkbox"/> BERITA BUANA <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> BUSSINESS NEWS <input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> POS KOTA <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SINAR PAGI <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

LINTAS EKONOMI

Penyelundupan Satwa Lebih Besar

JAKARTA— Penyelundupan satwa langka diperkirakan nilainya lebih besar dari penyelundupan kayu yang marak selama era reformasi beberapa tahun terakhir. "Meski belum ada perhitungan pasti besar nilai penyelundupan satwa langka itu, kita menduga nilainya besar sekali dan lebih besar dari penyelundupan kayu," kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, I Mosa Sumadja di Cipayung, Selasa (6/8). Selain diselundupkan ke luar negeri, katanya, satwa langka itu juga diperdagangkan di pasar dalam negeri dan permasalahannya masih besar. Bahkan Subadja menperkirakan, sekitar 40% dari volume perdagangan illegal ternak selama periode 1970-1992 di Asia Timur berasal dari Indonesia. Menurut Subadja, Cina merupakan pasar terbesar penyelundupan satwa langka yang diambil ilegal tubuhnya untuk digunakan untuk obat.

Untuk melindungi satwa langka, kata Subadja, pemerintah mengajak berbagai pihak melakukan kerjasama dan mendirikan lembaga pelayanan dan perdagangan harimau, badak Sumatera, dan gajah Sumatera melalui penegakan hukum secara konsisten. Dikatakannya, ketiga satwa langka itu termasuk hewan karang, perburuan dan perdagangan yang masih berlangsung hingga kini dan sedikitnya sepuluhnya habis mereka akibat pembanguan hutan dan perburuan hutan lindung yang marak beberapa tahun terakhir.

Dalam sepuluh tahun terakhir, populasi harimau di Sumatra makin menyusut harimau karena sedakinya 33 ekor pada tahun 1993, sedang populasi badak Sumatera juga turun 60 persen dari 400 ekor pada 1993 menjadi 150 ekor pada tahun 2002. Sementara itu, 12 ekor gajah terunuh di Riau karena ditembak pada tahun 1996 dan 17 ekor gajah di Sumat dibunuh selama periode Mei 2002. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 12 ekor gajah mati terbunuh selama kurun 1996-2002. "Sab



05

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Bln: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MARE <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGUST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DI			
<input type="checkbox"/> ANTARA <input type="checkbox"/> BERITA BUANA <input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> BUSSINESS NEWS <input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> POS KOTA <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SINAR PAGI <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

LSM bentuk jaringan advokasi harimau

BOGOR (Bisnis)— Sejumlah LSM peduli konservasi dan Dijin Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Depok, membentuk jaringan Advokasi Harimau, Badak, dan Gajah (JAHBG) guna mengantisipasi punahnya satwa langka tersebut.

Pembentukan JAHBG yang diketuai oleh Ropo, ketua, itu untuk melindungi satwa langka jenis harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrense*), badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dan gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumatrensis*).

Usur dan JAHBG berasal dari Yayasan WWF Indonesia, Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP), Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA), International Rhino Foundation (IRF), Fauna dan Flora International (FFI), Conservation International (CI) Indonesia, Yayasan Wirsidan Unit Manajemen Leuser (UML) (CI).



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> ANTARA | <input type="checkbox"/> KOMPAS | <input type="checkbox"/> REPUBLIKA | <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO |
| <input type="checkbox"/> BERITA BUANA | <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA | <input type="checkbox"/> SINAR PAGI | <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM |
| <input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA | <input type="checkbox"/> NERACA | <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN | <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN |
| <input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS | <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT | <input type="checkbox"/> SUARA KARYA | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT | <input type="checkbox"/> POS KOTA | <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO | <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA | <input type="checkbox"/> SENTANA PAGI | <input type="checkbox"/> |

Dephut: Penyelundupan satwa langka meningkat

JAKARTA—Menteri Pejabat Departemen Kehutanan mengungkapkan, penyelundupan dan penjualan liar satwa langka di Indonesia terus meningkat, menyusul lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam.

Dijeri Perindogan, Hutan dan Konservasi Alam, Dephut, I Made Sukadja Gungel, mengatakan perdagangan ilegal satwa langka tidak hanya terjadi di dalam negeri melainkan juga ke luar negeri.

"Meskipun belum ada pertukangan yang pasti, namun diduga nilai kerugian kerugian akibat perdagangan ilegal itu jauh lebih besar dari kasus penyelundupan kayu," katanya di Jakarta kemarin.

Berdasarkan data Dephut, kerugian negara akibat pembongkaran liar (*illegal logging*) mencapai Rp 30 triliun per tahun dengan tingkat kerusakan hutan dalam 10 tahun terakhir mencapai 1,6 juta ha

per tahun. Sebagian besar hasil dari *illegal logging* itu di selundupkan ke berbagai negara.

Tapi, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kegiatan akibat pencurian kayu dari hutan di Indonesia mencapai US\$5,5 miliar per tahun dengan perhitungan harga kayu US\$150 per m³.

Pada saat, sekarsang di pasaran dunia harga kayu dapat mencapai US\$300 per m³.

Nilai kerugian itu dilaporkan Indonesia Tropical Forest Management Project (ITFMP) yang berbasiskan Inggris pada 1998. Menurut lembaga pemerintah itu, jumlah sebesar US\$8,5 miliar setara dengan 20% utang Indonesia dari Consultative Group on Indonesia (CGI).

Menurut Sukadja, Cina merupakan pasar terbesar penyelundupan satwa langka yang diambil bagian tubuhnya untuk dipasarkan untuk obat.

Diperkirakan 40% dari volume perdagangan tulang harimau selama periode 1970-1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia.

"Oleh karena itu untuk melindungi satwa langka tersebut pemerintah mengajak berbagai pihak kerjasama dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan Gajah Sumatera melalui penegakan hukum secara konsisten," tandasnya.

Menurut dia, ketiga satwa langka itu terancam punah karena perburuan dan perdagangan yang masih berlangsung hingga kini dan semakin sempitnya habitat mereka.

Menurut catatan Dephut, dalam sepuluh tahun terakhir setidaknya 33 ekor Harimau Sumatera terburuk setiap tahun akibat perburuan liar, sedang populasi Badak Sumatera juga turun 50% dari 400 ekor pada 1993 menjadi 150 ekor pada 2001. (lat)



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> ANTARA | <input type="checkbox"/> KOMPAS | <input type="checkbox"/> REPUBLIKA | <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO |
| <input type="checkbox"/> BERITA BUANA | <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA | <input type="checkbox"/> SINAR PAGI | <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM |
| <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA | <input type="checkbox"/> NERACA | <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN | <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN |
| <input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS | <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT | <input type="checkbox"/> SUARA KARYA | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> HARIAN TERBIT | <input type="checkbox"/> POS KOTA | <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO | <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA | <input type="checkbox"/> SENTANA PAGI | <input type="checkbox"/> |

RI kaya aneka hayati

JAKARTA—Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pusat konservasi dunia.

Dijeri PEKA Dephut (Made Sukadja) mengakui upaya itu karena masih lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam.

Made mengatakan degradasi dan deforestasi hutan dan ekosistemnya tidak hanya disebabkan oleh *illegal logging* tetapi juga hilangnya satwa langka karena perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka.

"Namun saat ini belum terselesaikan dengan baik karena banyaknya perburuan liar," kata Menteri dalam kesempatan itu.

kesempatan itu.

Eksportir terbesar

Senior species officer WWF Chairul Saleh mengungkapkan, Harimau Sumatera sudah sangat menipis, sampai saat ini populasi Harimau Sumatera hanya tinggal 150 ekor.

"Jika praktik perburuan dan perdagangan liar tidak dihentikan dalam kurun waktu 7-12 tahun kedepan, tak akan lagi kita temukan Harimau Sumatera," ujar Chairul. Ia mengungkapkan, era 90-an, Indonesia menjadi eksportir harimau terbesar untuk pasar Asia khususnya ke Korea Selatan. (fen)



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

ANTARA KOMPAS REPUBLIKA MAJALAH TEMPO
 BERITA BUANA MEDIA INDONESIA SINAR PAGI MAJALAH FORUM
 BISNIS INDONESIA MERACA SUARA PEMBARUAN SINAR HARAPAN
 BUSINESS NEWS PIKIRAN RAKYAT SUARA KARYA
 HARIAN TERBIT POS KOTA THE JAKARTA POST
 KORAN TEMPO RAKYAT MERDEKA SENTANA PAGI

Populasi Harimau, Badak, Orang Utan Memprihatinkan

JAKARTA (Media): Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini populasi satwa langka Indonesia seperti harimau dan badak Sumatra serta orang utan sangat memprihatinkan. Harimau Sumatra misalnya, sedikitnya 33 ekor mati terbunuh setiap tahunnya.

"Pada 1993 populasi harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) ini tercatat 400 ekor, dan 2002 mengalami penurunan menjadi 150 ekor. Sedangkan untuk badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*) populasinya juga mengalami penurunan, yakni mencapai 60%," ujar Kepala Pusat Informasi Kehutanan Koes Saparjadi di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kecenderungan minimal 33 ekor harimau Sumatra mati terbunuh tiap tahun masih terus berlangsung. Hal ini terbantu dengan adanya indikasi perburuan ilegal yang masih berlangsung hingga saat ini.

Koes menjelaskan, sebanyak 40% volume perdagangan tulang harimau dalam kurun waktu 1970 hingga 1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia. Jumlah tulang yang diperdagangkan berkisar antara empat ton sampai 10 ton. "Indonesia merupakan salah satu negara dengan perdagangan gelap satwa langka yang terbesar di Asia," tegas Koes.

Demikian juga halnya dengan badak Sumatra. Lebih dari 60% populasinya mengalami penurunan. Populasi 1993 tercatat 400 ekor dan saat ini menjadi 150 ekor pada 2002.

Sementara itu, badak pelana pembudidayaan gajah masih terus berlangsung secara serius. Pada 1996 sebanyak 120 ekor gajah mati di daerah Krau karena ditancu. 17 ekor gajah mati di Sumatra Utara pada Mei 2002, serta 12 ekor di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam kurun waktu 1996 sampai 2002.

Manajer Program Konservasi Hutanau Sumatra Waldemar Hasaholm mengatakan, untuk menyelamatkan harimau Sumatra pihaknya sedang membentuk Tiger Protection Unit (TPO), yang terintegrasi dengan program-program konservasi pelestarian hutan dan konservasi alam (P3HKA).

Selain mengaktifkan kegiatan patroli pengamanan, pihaknya juga akan melakukan investigasi perburuan dan perdagangan, serta konflik manusia di Pulau Sumatra. Program-program tersebut memunculkan komitmen LSM peduli konservasi, baik nasional maupun internasional untuk mendukung P3HKA dalam hal pengendalian hukum pada kasus kejahatan konservasi.

Sedangkan Dirjen Pelestarian Ekosistem dan Konservasi Alam Dephut, Marle Sihalim mengatakan,

perak gajah ilegal satwa langka tidak hanya terjadi di dalam negeri, melainkan juga terus diselundupkan ke luar negeri.

"Kendati belum ada pembungkuan yang pasti, namun upaya telah ekornasi pemeliharaan satwa langka ke luar negeri sudah lebih besar dari angka volume penyelundupan ilegal,"

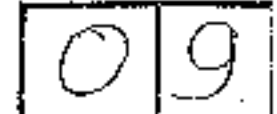
Sementara itu, orang utan (*Pongo pygmaeus*) yang terbunuh di Indonesia diperkirakan sekitar 910 ekor per tahun. Hal itu dengan asumsi bahwa satu ekor orang utan yang ditangkap maka tiga lima ekor akan terbuai.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Pusat Rehabilitasi dan Reintroduksi Orang Utan, Yaparizat Sembaja, Kalimantan Tengah, Jan Marjalia kepada wartawan di Balikpapan, Senin.

Sedangkan orang utan yang diselamatkan saat ini berada dalam program konservasi di Sembaja, sekitar 150 ekor.

"Perhitungan orang utan yang terbunuh tersebut, karena kasus, namun tidak semua orang utan barisan terancam punah. Satwa langka itu sendiri,"

Dijelaskan pula bahwa perkiraan itu berdasarkan data dengan asumsi rata-rata 100 orang utan dibunuh setiap tahunnya. Akibatnya, orang utan diperkirakan akan melarikan diri ke hutan-hutan.



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

ANTARA KOMPAS REPUBLIKA MAJALAH TEMPO
 BERITA BUANA MEDIA INDONESIA SINAR PAGI MAJALAH FORUM
 BISNIS INDONESIA MERACA SUARA PEMBARUAN SINAR HARAPAN
 BUSINESS NEWS PIKIRAN RAKYAT SUARA KARYA
 HARIAN TERBIT POS KOTA THE JAKARTA POST
 KORAN TEMPO RAKYAT MERDEKA SENTANA PAGI

Ancaman Kelestarian Satwa Langka Kondisi 10 Tahun Terakhir

- 33 ekor harimau Sumatra mati terbunuh per tahun.
- 40% volume perdagangan tulang harimau pada periode 1970-1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia.
- Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) mamalia besar dan sangat kuat di dunia. Ukuran tubuhnya bisa mencapai tinggi 95 cm dan panjangnya 290 cm, sedangkan beratnya antara 227-272 kg. Berkembang biak dengan melahirkan. Masa kehamilan berkisar antara 103-112 hari, anak yang dilahirkan 1 hingga 6 ekor.
- 60% populasi badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*) mengalami penurunan dalam 10 tahun. Tahun 1993 tinggal 400 ekor. Tahun 2002 tinggal 150 ekor.
- Badak Sumatra bercula dua. Habitat terbesar di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut dan sekitar lembah dan sungai Alas di Aceh.
- Orang utan (*Pongo pygmaeus*) yang terbunuh di Indonesia diperkirakan sekitar 910 ekor per tahun. Diperkirakan jumlah populasi satwa langka itu di wilayah Kalimantan termasuk wilayah Malaysia sekitar 9.000-15.000 ekor.





--	--

PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

TEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BLN:	<input type="checkbox"/> JAN	<input type="checkbox"/> FEB	<input type="checkbox"/> MAR	<input type="checkbox"/> APR	<input type="checkbox"/> MEI	<input type="checkbox"/> JUNI	<input type="checkbox"/> JULI	<input checked="" type="checkbox"/> AGST	<input type="checkbox"/> SEPT	<input type="checkbox"/> OKT	<input type="checkbox"/> NOV	<input type="checkbox"/> DES																			
<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO																												
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input type="checkbox"/> SINAR PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM																												
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> NERACA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN																												
<input type="checkbox"/> BUSSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/>																												
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input checked="" type="checkbox"/> POS KOTA	<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST	<input type="checkbox"/>																												
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/>																												

Penyelundupan satwa langka sudah sangat memprihatinkan

JAKARTA (Pos Kota) - Penyelundupan satwa langka ke luar negeri menurut Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, I Made Subadia, sudah sangat memprihatinkan dan nilainya diperkirakan lebih besar daripada penyelundupan kayu. Selain diselundupkan ke luar negeri, satwa langka juga diperdagangkan di dalam negeri. Satwa-satwa tersebut seperti harimau Sumatera, badak Sumatera dan gajah Sumatera yang terancam kepunahannya.

"Maraknya perdagangan dan perburuan karena lemahnya penegakan hukum," jelas Dirjen PHKA. Dalam 10 tahun terakhir populasi harimau Sumatera sangat memprihatinkan. Sedikitnya 33 ekor mati terbunuh setiap tahunnya. Untuk melindungi satwa langka dari kepunahan, kata Subadia, pemerintah mengajak berbagai pihak melakukan kerjasama dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan ilegal melalui penegakan hukum secara konsekuen.



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

TEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BLN:	<input type="checkbox"/> JAN	<input type="checkbox"/> FEB	<input type="checkbox"/> MAR	<input type="checkbox"/> APR	<input type="checkbox"/> MEI	<input type="checkbox"/> JUNI	<input type="checkbox"/> JULI	<input checked="" type="checkbox"/> AGST	<input type="checkbox"/> SEPT	<input type="checkbox"/> OKT	<input type="checkbox"/> NOV	<input type="checkbox"/> DES																			
<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO																												
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input type="checkbox"/> SINAR PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM																												
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> NERACA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN																												
<input type="checkbox"/> BUSSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/>																												
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input type="checkbox"/> POS KOTA	<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST	<input type="checkbox"/>																												
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/>																												

Akibat Perdagangan dan Perburuan

Satwa Liar Terancam Punah

Perdagangan satwa liar di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia.

JAKARTA - Kekayaan hayati Indonesia yang dikenal sebagai pusat konservasi dunia saat ini terancam kepunahan. Berbagai jenis satwa liar yang dilindungi, menurut Menteri M Prakosa, menuju ke arah kepunahan akibat perburuan dan perdagangan yang terus berlangsung hingga kini.

"Dalam sepuluh tahun terakhir ini, populasi harimau Sumatera sangat memprihatinkan," kata Prakosa beberapa waktu lalu di Bogor. Selanjutnya, lanjutnya, badak dan gajah Sumatera pun mengalami ancaman serupa akibat

perdagangan liar tersebut.

Berdasarkan data yang ada, Prakosa mengungkapkan populasi harimau Sumatera sedikitnya 33 ekor mati terbunuh tiap tahun. Badak Sumatera lebih dari 60 persen populasinya menurun. Di tahun 1993, tercatat 400 ekor dan menurun di tahun 2002 menjadi 150 ekor.

Sebanyak 12 ekor gajah mati karena diracun tahun 1996 di Rindu. Dan 17 ekor mati di Sumatera Utara pada Mei 2002. Sedang 12 ekor mati dibunuh di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam kurun waktu 1996-2002.

Kondisinya semakin parah lagi bila melihat data internasional. Menurut Dirjen Biodiversitas dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kehutanan, ekspor tulang harimau ilegal dari Indonesia ke luar negeri terbesar selanjutnya. Pada periode 1979-1993, Indonesia me-

nyumbangkan empat ton dari sepuluh ton perdagangan tulang harimau untuk Asia Timur.

Tak hanya itu, dari data yang sama, Indonesia termasuk negara dengan perdagangan gelap satwa langka terbesar di Asia.

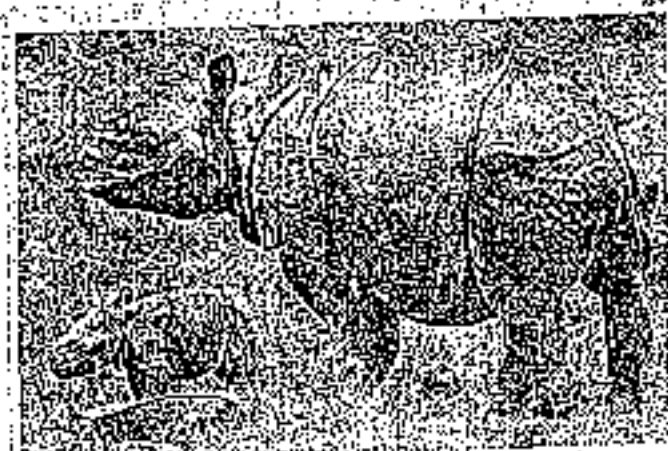
Sementara itu, Senior Species Officer World Wildlife Fund (WWF) Chaerul Saleh menyatakan tingkat perburuan satwa liar dan perdagangannya sudah semakin parah. Mereka tak hanya merambah pada hutan-hutan sekitar, juga, papir Chaerul, ke taman-taman nasional untuk konservasi satwa liar.

Perdagangan itu, lanjutnya, meliputi satwa liar yang hidup maupun yang mati, termasuk produk dari satwanya itu sendiri. Untuk tulang harimau, biasanya sangat laku di Asia Timur untuk peng-



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tel: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			
Bln: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DES			
<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input type="checkbox"/> SINAR PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> NERACA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input type="checkbox"/> POS KOTA	<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/>



PUNAH: Badak merupakan salah satu hewan langka yang diburu dan diperdagangkan sehingga terancam punah.

ubatan Cina. Harga tulang harimau mencapai Rp 150-200 ribu per kilogram. Sedangkan kulitnya mencapai harga Rp 6-8 juta per lembar. Data sudah di offset.

pagar Chaerul, harganya melambung lagi hingga Rp 20-28 juta. "Kami meminta pemerintah meniadak tegas pada petaka perburuan dan perdagangan satwa liar," wed



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tel: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Bln: <input type="checkbox"/> JAN <input type="checkbox"/> FEB <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> APR <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI <input type="checkbox"/> JULI <input checked="" type="checkbox"/> AGST <input type="checkbox"/> SEPT <input type="checkbox"/> OKT <input type="checkbox"/> NOV <input type="checkbox"/> DES			
<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input checked="" type="checkbox"/> SINAR PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> NERACA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input type="checkbox"/> POS KOTA	<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/>

Nilai Penyelundupan Satwa Langka Lebih Besar Dari Kayu

JAKARTA (SP)
Penyelundupan satwa langka diperkirakan pemerintah nilainya lebih besar dari penyelundupan kayu yang marak selama era reformasi beberapa tahun terakhir.
Meski belia ada peninjauan pasti besar nilai penyelundupan satwa langka ini, Vito Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, (Mazli Subadia, di Cipuyung, Bogor, Selasa (6/8)). "Kita menduga nilainya besar sekali dan lebih besar dari penyelundupan kayu."
Selain diselundupkan ke luar negeri, menurut ia, satwa langka ini juga diperdagangkan di pasar dalam negeri dan permintaannya masih besar.
Diperkirakan sebesar 40% dari volume perdagangan gulang harimau selama periode 1970-1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia. Menurut Subadia, China merupakan pasar terbesar penyelundupan satwa langka yang diambil bagian tubuhnya untuk digunakan untuk obat.
Urut melindungi satwa langka, kata Subadia, pemerintah mengajak berbagai pihak melakukan

kerja sama dan meniadak tegas pada perburuan dan perdagangan liar itu, badak, simpanse, dan gajah Sumatera melalui penegakan hukum secara konsisten.
Dikatakannya, ketiga satwa langka itu langka, punah karena perburuan dan perdagangan yang masih berlangsung hingga kini dan semakin sepiunya habitat mereka akibat pembangunan hutan dan penjurahan hutan ladang yang marak beberapa tahun terakhir.
Dalam sepuluh tahun terakhir, populasi kerbau siam secara nasional mengalami penurunan karena seluknya 13 ekor mati terbunuh setiap tahunnya, sedang populasi badak Sumatera juga turun 60% dari 400 ekor pada 1992 menjadi 150 ekor pada 2002.
Semantara itu, 12 ekor gajah terbunuh di Riau karena diracun pada tahun 1996 dan 57 ekor gajah di Sumat dibunuh selama periode Mei 2001. Di Forum Nasional Berani Berjuang Selasa, 12 ekor gajah mati terbunuh selama kurun 1996-2002.

Dokterasi Jaringan Advokasi Dalam kesemparan yang sama, sejumlah komponen mendeklarasikan jaringan advokasi peninjauan agensipnsasi tion terpacu penah nya beberapa jenis mamalia besar langka di Indonesia, khususnya Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Badak Sumatera (Dicerorhinus Siamensis) dan Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatrensis). Deklarasi Jaringan Advokasi Harimau-Badak-Gajah (JAHBG) itu diumumkan di Cipuyung, ditandai oleh kulungan peninjauan mapen LSM Jaringan tersebut merupakan jaringan LSM peduli konservasi dan Dirjen PHKA Dephut. • fud



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input type="checkbox"/> SINAR PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> NERACA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input type="checkbox"/> POS KOTA	<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/>

SINGKAT

Dibentuk Jaringan Advokasi Harimau, Badak, dan Gajah

UNTUK menegakkan populasi Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Gajah Sumatera, dibentuk Jaringan Advokasi Harimau, Badak dan Gajah (JAHBG). JAHBG dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman kepunahan terhadap ketiga satwa tersebut akibat perburuan dan perdagangan ilegal yang masih berlangsung.

Keterangan tertulis Departemen Kehutanan yang diterima *Poskota*, Jumat (2/8), di Jakarta menjelaskan, populasi harimau, badak dan gajah dalam 10 tahun terakhir terus menurun.

Setiap tahun, sekitar 33 ekor harimau mati terbunuh. Sedangkan Badak Sumatera menurun sekitar 60 persen. Pada 1993, jumlahnya mencapai 400 individu, pada 2002 hanya tinggal 85 ekor.

Gajah Sumatera juga mengalami penurunan, yaitu 12 ekor mati di Riau (1998), 17 ekor mati di

Sumatera Utara (2000), dan selama 1993 hingga 2002 sebanyak 12 ekor terbunuh di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. (1/8)



PUSAT INFORMASI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Tgl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BLN: JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

<input type="checkbox"/> ANTARA	<input type="checkbox"/> KOMPAS	<input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO
<input type="checkbox"/> BERITA BUANA	<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA	<input type="checkbox"/> SINAR PAGI	<input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM
<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA	<input type="checkbox"/> NERACA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN	<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN
<input type="checkbox"/> BUSINESS NEWS	<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> HARIAN TERBIT	<input type="checkbox"/> POS KOTA	<input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO	<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA	<input type="checkbox"/> SENTANA PAGI	<input type="checkbox"/>

'Military officers involved in rare animal trade'

Moch. N. Kurniawan
The Jakarta Post
Jakarta

An environmentalist alleged, on Tuesday, that high-ranking military officers and government officials were involved in the killing and trade of endangered Sumatran tigers, rhinos and elephants.

Harry Alexander, an official with the Jakarta-based Advocacy Network for Tigers, Rhinos and Elephants (ARTRE), said the illegal animal trade flourished in several provinces in Sumatra, including Lampung and Aceh.

"We have strong indications of their (high-ranking military officers and government officials) involvement. And if we don't stop such activities, Sumatran tigers, rhinos and elephants will be extinct in the next few years," Harry said during a break in a workshop being held in Bogor on the protection of endangered animals.

Harry cited the example of a high-ranking military officer in Lampung who remained above investigation despite allegations that he was involved in the recent

killings of rare animals in the province.

"As usual, the military will only allow low-ranking officers to be prosecuted," he said.

In the Aceh, he said, military officers backed the illegal animal trade, using the cover afforded them by the ongoing operations against the separatist Free Aceh Movement.

According to data from ARTRE, some 33 Sumatran tigers have been killed every year since 1993, and currently there are only between 400 and 500 Sumatran tigers left in the wild.

The data shows that the number of wild Sumatran rhinos on the island has declined to 150 in early



Map of Sumatra showing the distribution of tigers, rhinos, and elephants.

2002 from 400 in 1993. And the Sumatran wild elephant population has also rapidly declined from 2,000 in 1994.

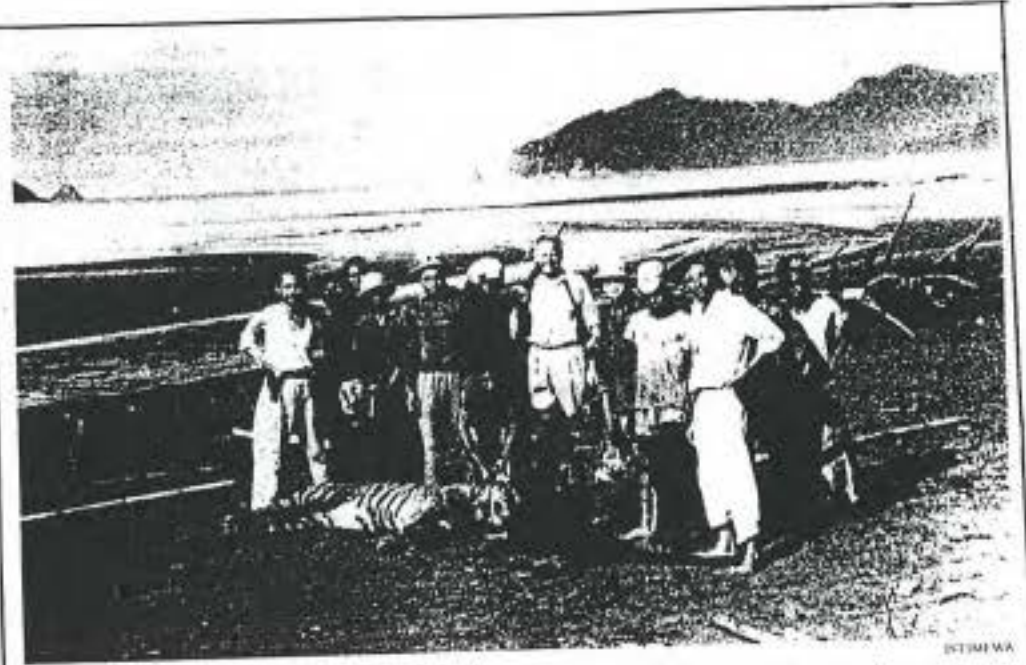
Sumatran tigers and elephants are only found in Sumatra, while the Sumatran

Perburuan Harimau Terus Berlangsung

REPUBLIK tercinta Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Malah negeri yang kini dilanda krisis multidimensi ini dijuluki sebagai negara pusat konservasi dunia.

KOMPAS

RABU, 23 OKTOBER 2002



Berburu Harimau — Perburuan terhadap harimau Jawa hampir tak pernah putus, seperti ditunjukkan gambar ini yang memperlihatkan perburuan di Meru Betiri, Jawa Timur.

AKAN tetapi, berbagai jenis satwa seperti termasuk harimau sumatera, badak sumatera, dan gajah sumatera saat ini terancam punah. Tidak hanya karena habitat yang semakin sempit, namun juga akibat perburuan untuk diperdagangkan sebab perdagangan binatang langka itu masih berlangsung hingga saat ini.

Semua itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum, belum ditetapkannya bidang konservasi sumber daya alam sebagai prioritas utama program Pemerintah Indonesia di samping rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam.

Terkait persoalan yang sangat memprihatinkan itu Jaringan Advokasi Harimau, Badak, dan Gajah (HBG) yang merupakan jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli konservasi dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA) menyampaikan Deklarasi Anti-perburuan dan Perdagangan HBG. Deklarasi itu juga pernah disampaikan bersamaan dengan acara Lokakarya Anti-perburuan dan Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera yang diselenggarakan oleh Dirjen PHKA, Jaringan HBG dan The Tiger Foundation-Indonesia Program (TTF-IP) beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal PHKA I Made Subadia mengatakan, perdagangan ilegal satwa langka tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga diselundupkan ke luar negeri. Walaupun belum ada perhitungan yang pasti, diduga nilai ekonomi penyelundupan satwa langka ke luar negeri lebih besar dari penyelundupan kayu.

"Pemerintah mengajak berbagai pihak untuk melakukan kerja sama yang lebih erat dan

sinergis serta menindak tegas para pelaku perburuan dan perdagangan harimau, badak dan gajah melalui penegakan hukum.

♦♦♦

MENURUT Chairul Saleh dari Yayasan WWF Indonesia (WWF-I), perburuan dan pembunuhan harimau sumatera harus dihentikan segera. Jika tidak, dengan percepatan terbunuh seperti sekarang ini, maka dalam kurun waktu tujuh sampai 12 tahun ke depan populasi liar di alam harimau sumatera akan punah.

Harimau sumatera tidak hanya terancam oleh perburuan, tetapi juga oleh hilangnya hewan mangsa yang juga memiliki tekanan perburuan tinggi.

"Untuk menyelamatkan harimau sumatera, di samping menghentikan perburuan dan perdagangan, penting juga untuk menjaga populasi hewan mangsanya. Misalnya dengan menerapkan sanksi hukum secara konsisten bagi eksploitasi satwa mangsa harimau yang dilindungi dan menetapkan regulasi terhadap eksploitasi hewan mangsa harimau yang tidak dilindungi," kata Hariyo Tabah Wibisono dari Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP). Ia menambahkan, regulasi tersebut

harus aplikatif hingga tingkat daerah.

Sementara Waldemar Hasiholan, Manajer Program Konservasi Harimau Sumatera, (TTF-IP dan PHKA) mengatakan, untuk menyelamatkan harimau sumatera, pihaknya sedang membentuk Tiger Protection Unit (TPU) yang akan terintegrasi dengan program-program kolaborasi PHKA serupa seperti Indonesia Rhinoceros Conservation Program, (IRCP-PHKA, International Rhino Foundation dan WWF-I) dan TPU (WCS-IP, WWF, TTF-IP).

Selain kegiatan patroli pengamanan, unit-unit tersebut melaksanakan kegiatan antara lain, investigasi perburuan dan perdagangan serta konflik manusia dan HBG di Pulau Sumatera. Program-program tersebut menunjukkan komitmen LSM peduli konservasi baik nasional maupun internasional untuk mendukung PHKA dalam bidang penegakan hukum pada kasus-kasus kejahatan konservasi terhadap HBG.

AA Hutabarat, Manager Program IRCP-PHKA melihat bahwa upaya mencegah perburuan badak di Indonesia perlu diintensifkan. "Kita masih sering tertinggal di belakang para pemburu Badak," ujar Hutabarat, yang telah membina Rhino Protection Unit lebih

dari lima tahun di Sumatera dan Jawa.

Selain itu diperlukan tindakan kerja sama sinergis dari semua pihak terkait seperti Departemen Kehutanan, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk memberikan sanksi berat bagi para pemburu badak sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Jangan sampai terulang, pemburu gelap badak yang sudah terbukti hanya dikenakan hukuman kurungan tiga bulan. Selain tidak strategis, fenomena ini juga tidak memberikan efek jera bagi pemburu gelap lainnya.

"Pemerintah harus konsisten mengimplementasikan ketentuan CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna) dalam menangani permasalahan konservasi harimau, badak, gajah, dan produk-produknya," tutur Daniel Walter Sinaga dari CITES Tiger Enforcement Task Force, Direktorat Jenderal PHKA. Menurut Harry Alexander dari Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA), para pemburu dan pembunuh harimau, badak dan gajah dapat dikenakan tuduhan dan sanksi pidana ber lapis karena ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Misalnya Undang-Undang (UU) Nomor 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman sanksi bisa mencapai penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 milyar.

♦♦♦

HARIMAU, badak, dan gajah sumatera beserta habitatnya harus dilestarikan, supaya ekosistem-ekosistem Sumatera yang sangat berharga tetap lestari. "Kita harap Indonesia bisa menghindari masalah seperti yang terjadi terhadap harimau dari Cina Selatan," kata Ron Tilson, Direktur Konservasi di Kebun Binatang Minnesota dan Ketua dari The Tiger Foundation.

Dari sensus dan survei yang dilaksanakan oleh The Tiger Foundation dan Pemerintah Cina selama tahun 2001, diketahui bahwa harimau tidak dijumpai lagi di seluruh lokasi survei. Selain itu satwa mangsanya sangat berkurang, dan habitat yang optimal sudah tinggal sedikit. "Harimau Cina Selatan jelas sudah di tepi ju-

rang kepunahan. Nasib yang sama pernah terjadi pada harimau Bali dan harimau Jawa di Indonesia beberapa tahun yang lalu yang berakhir dengan kepunahan kedua satwa tersebut," tegas Ron Tilson.

Ancaman kelestarian satwa langka kondisi 10 tahun terakhir menggambarkan minimal 33 ekor harimau sumatera mati terbunuh per tahun. Kecenderungan ini masih terus berlangsung, terbukti adanya indikasi perburuan ilegal yang masih berlangsung hingga saat ini. Lebih dari 60 persen populasi badak sumatera mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir (Tahun 1993 tercatat 400 ekor dan 150 ekor tahun 2002). Jumlah kawasan yang dihuni badak sumatera

telah mengalami penurunan dari 10 menjadi empat kawasan dalam periode yang sama.

Pembunuhan gajah juga masih terus berlangsung secara serius. Beberapa kasus yang mencolok antara lain peracunan 12 ekor gajah di Riau tahun 1996, 17 ekor gajah mati di Sumatera Utara bulan Mei tahun 2002, dan minimal 12 ekor gajah mati dibunuh di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam periode tahun 1996-2002.

Di mata internasional, situasi Indonesia itu mendapat sorotan tajam. Sebanyak 40 persen dari volume perdagangan tulang harimau pada periode tahun 1970 sampai 1993 di Asia Timur berasal dari Indonesia (4 ton dari 10 ton perdagangan tu-

lang). Negeri tercinta ini juga merupakan salah satu negara dengan perdagangan gelap satwa langka terbesar di Asia. (Associated Press, April 2002).

Dalam konteks ini Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yaitu mengimplementasikan konvensi CITES (Resolusi 9.13). Melaksanakan penerapan produk-produk perundangan bidang konservasi secara konsisten. Mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap ancaman *total trade ban* satwa dari CITES sekretariat (contoh kasus tahun 1999).

Ini mengingat lemahnya penegakan hukum di negeri ini yang ditandai oleh masih tingginya keterlibatan oknum aparat penegak hukum.

Belum ada sistem perlin-

dungan terhadap keselamatan para penggiat perlindungan satwa liar di tingkat lapangan. Perburuan dan perdagangan satwa liar belum memperoleh penekanan khusus diakibatkan dengan program-program prioritas kehutanan.

Selain itu pemahaman aparat penegak hukum mengenai hukum konservasi khususnya perlindungan terhadap satwa dilindungi masih lemah.

Namun, di balik semua itu kesadaran dan dukungan masyarakat mulai terlihat. Misalnya telah dibentuk Jaringan Advokasi Harimau, Badak, dan Gajah (JAHBG) dengan anggota multipihak yang terdiri dari 20 LSM nasional dan Internasional, pemerintah, dan anggota masyarakat. (SMU)



Menyusui — Mery, seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) umur 16 tahun, melahirkan tiga ekor anak di kandangnya di Kebun Binatang Surabaya (KBS) Jawa Timur, 25 September 2002. Kelahiran ini merupakan yang kelima bagi Mery yang juga lahir di KBS. Beberapa kebun binatang juga mengoleksi harimau sumatera, tetapi perburuan terhadapnya terus berlangsung.

Mencari Jejak yang Tersisa



Goa Pelawan — Di ruang sempit bawah tanah ini ditemukan jejak harimau berupa bekas cakaran di permukaan tanah. Mungkinkah harimau masih terdapat di Gunung Kidul?

[KOMPAS] RABU, 23 OKTOBER 2002

DENGAN ditemukannya jejak cakar harimau pada dinding Goa Pelawan di Pegunungan Seribu yang letaknya di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh sejumlah mahasiswa Jurusan Antropologi (*Kompas*, 19/7/2002) sangatlah menarik, kendati temuan itu tidaklah sengaja. Jejak itu sendiri belum bisa diidentifikasi dari jenis harimau jawa, macan kumbang, atau macan tutul.

Akan tetapi, dengan penemuan itu sendiri, sungguh berarti untuk penelitian lebih lanjut. Melihat kondisi adanya hutan yang terbangun lewat penghijauan di Kabupaten Gunung Kidul khususnya pada bukit-bukit Pegunungan Seribu, tidak menutup kemungkinan sisa-sisa harimau yang masih ada bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya di habitat yang secara tidak langsung telah ditata kembali.

Kita bisa melihat salah satu hutan yang bisa dinikmati sepanjang jalan ke arah Kabupaten Gunung Kidul dari Kota Yogyakarta, yaitu hutan Wanagama. Keberhasilan menghidupkan kembali daerah yang dulu sempat menjadi *trade mark* daerah tandus, tidak meninggalkan kesan rekayasa. Nuansa hijau terlihat membentang di kiri-kanan jalan antara Kota Wonosari-Pantai Baron di laut selatan. Secara alami, lalu apa yang menarik dari temuan itu?

Seperti kita ketahui populasi satwa langka dari jenis harimau sudahlah diambang kepunahan. Dari yang populer dengan nama macan gembong (Jawa Tengah, Jawa Timur) macan (maung Lodaya—Jawa

Barat), macan tutul dan macan kumbang, adanya jejak harimau jawa yang pernah diperkirakan populasinya tinggal tiga-lima ekor di Meru Betiri, Jawa Timur, bisa menjadi petunjuk adakah harimau jawa yang tersisa dibagian Pulau Jawa ini selain yang ada di hutan lindung Meru Betiri. Jawabannya mungkin bisa atau nonsens belaka.

Instansi terkait yang berwenang mendata keberadaan satwa soliter tersebut, pastilah telah mengacak-acak seluruh hutan yang diperkirakan menjadi habitatnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada sisa kehidupan harimau jawa ini selain yang di Meru Betiri. Lalu apakah tidak menutup

kemungkinan ada hutan atau kawasan hutan di pegunungan atau gunung-gunung yang luput dari pemantauan?

◆◆◆
KHUSUSNYA di hutan-hutan Gunung Kidul, medan yang berbukit-bukit dan banyaknya goa-goa alam di situ, dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah juga mitos yang ramai saat ini bahwa "si embah" masih suka di depan mata penduduk, perlu dicari jawabannya. Di daerah lain di Pulau Jawa pun begitu. Ketika mengunjungi lokasi pemancar televisi di Gunung Cikuray, Jawa Barat, yang dipuncaknya masih berhutan, banyak cerita bahwa kalau pada malam hari sering binatang dengan ciri khas kulit

loreng itu turun gunung disekitar lokasi pemancar tersebut.

Juga di hutan Sancang wilayah Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Banyak kisah-kisah dengan bumbu mitos yang biasanya dikaitkan dengan kejayaan kerajaan dulu. Tetapi, dari semua keterangan penduduk yang katanya pernah sesekali memergoki si raja hutan itu, tidak satu pun yang bisa memberikan bukti yang akurat. Entah berupa jejak kotor, goresan kuku di batang pohon atau dari rekaman foto.

Apalagi kepedulian masyarakat pada satwa yang satu ini tidaklah tinggi. Dari data yang bisa didapat dari Pusat Informasi *Kompas* (yang dulu rajin

sekali memuat tulisan kehidupan harimau) keberadaan harimau jawa kemungkinan sudah dianggap punah.

Sisa terakhir yang ada di habitat Meru Betiri sampai sekarang pun, tidak ada bukti-bukti kuat. Lalu perlukah kita mencoba menelusuri kembali dari awal demi ilmu pengetahuan, apakah satwa langka ini telah benar-benar punah? Jawabannya perlu. Cara-cara dibawah ini mungkin bisa membantu untuk mencari jejak keberadaannya.

Pertama, mengadakan koordinasi yang berkesinambungan dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang terkait pada disiplin ilmunya, dengan mengadakan ekspedisi ke hutan-hutan baik yang diperkerakan masih utuh dan secara geografisnya begitu terpencil dan sulit dijangkau manusia.

Kedua, menindaklanjuti keterangan penduduk sekitar ditemukannya jejak yang ada di Goa Pelawan di atas, dengan ikut memantau terus-menerus disekitar kemungkinan yang termasuk kawasan jelajah dari harimau tersebut.

Ketiga, mencoba mencari bantuan dari WWF untuk mendukung pelaksanaannya. Seperti diketahui setelah harimau Bali di Pulau Bali punah, dan populasi harimau Sumatera yang terus menurun, begitu pula harimau jawa yang antara ada dan punah, keberadaan satwa ini merupakan koleksi dunia yang hanya ditemukan di Indonesia. Binatang eksotis yang terus diburu manusia ini, bukan mustahil dalam waktu dekat ini hanya tinggal cerita. Lalu siapa yang bertanggung jawab?

TRI WIDODO
Pemerhati lingkungan